

## SKRIPSI

### **DAMPAK KREDIT TERHADAP PENINGKATAN USAHA KECIL (STUDI KASUS PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA RAKYAT RIAU CABANG PEKANBARU)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Riau Pekanbaru*



**Disusun Oleh :**

**GUSTI RANDA**  
**NPM. 135110323**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jl. Khairuddin Nasution No. 113 Marpoyan Damai

Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Gusti Randa  
NPM : 135110323  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan S1  
PEMBIMBING I : Drs. M. Nur., MM  
PEMBIMBING II : Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si  
Judul Skripsi : DAMPAK KREDIT TERHADAP PENINGKATAN USAHA KECIL( STUDI KASUS PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA RAKYAT RIAU CABANG PEKANBARU)

MENYETUJUI :

**PEMBIMBING I**

(Drs. M. Nur., MM)

**PEMBIMBING II**

(Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si)

MENGETAHUI :=

**DEKAN**

(Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA)

**KETUA JURUSAN**

(Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih., M.Si)

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangam di bawah ini :

NAMA : GUSTI RANDA  
TEMPAT/TGL LAHIR : SEI ANGEK, 06 MARET 1991  
NPM : 135110323  
FAKULTAS : EKONOMI  
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN  
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK KREDIT TERHADAP PENINGKATAN USAHA  
KECIL (STUDI KASUS PT. BANK PERKREDITAN  
RAKYAT MITRA RAKYAT RIAU CABANG PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah murni dari hasil karya saya, bukan merupakan hasil karya orang lain (Bukan plagiat/duplikasi) dan sistematika penulisannya sudah mengikuti kaedah dari karya tulis ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia di tuntutan untuk hukum yang berlaku

Pekanbaru, 20 November 2019

Yang membuat pernyataan



## ABSTRAK

### DAMPAK KREDIT TERHADAP PENINGKATAN USAHA KECIL (STUDI KASUS PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA RAKYAT RIAU CABANG PEKANBARU)

OLEH :  
GUSTI RANDA  
NPM. 135110323

(Dibawah Bimbingan : Pembimbing I Drs. M. Nur, MM dan Pembimbing II  
Hj. Nawarti Bustamam. SE. M.Si)

*Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak kredit pada peningkatan usaha pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau. Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah : bagaimana dampak kredit pada peningkatan usaha pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau. Dalam penganalisa data digunakan metode Diskriptif yaitu, dengan cara membandingkan kondisi usaha kecil dari segi modal, pendapatan/keuntungan dan kesempatan kerja sebelum dan sesudah mendapatkan kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang merupakan pemecahan masalah yang dihadapi yang menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara/ interview serta kuisioner penelitian. Responden yang diambil adalah 47 usaha kecil yang ada di Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode purposive sampling. Dari analisis deskriptif diperoleh kesimpulan dengan adanya permodalan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau secara keseluruhan memperlihatkan adanya peningkatan modal usaha dari pengusaha kecil di daerah ini setelah memperoleh fasilitas kredit dari Lembaga Keuangan khususnya PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau dan dengan telah didapatnya peningkatan modal dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau, maka telah terjadi pula peningkatan pendapatan dan keuntungan yang diperoleh pengusaha kecil. Hal tidak terlepas dari peranan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau sebagai lembaga jasa intermediasi yang menghubungkan pelaku ekonomi yang berlebihan dana dengan pelaku ekonomi yang membutuhkan dana.*

*Kata Kunci : Modal, Pendapatan, Tenaga Kerja*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selain itu selawat beriring salam juga dikirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) diperlukan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini, penulis membuat skripsi yang berjudul “DAMPAK KREDIT TERHADAP PENINGKATAN USAHA KECIL (STUDI KASUS PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA RAKYAT RIAU CABANG PEKANBARU)”. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat dalam mengikuti ujian oral comprehensive guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari penulisan skripsi ini, penulisan banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik segi ini maupun penulisan. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Dengan demikian,

pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kepada orang tua ku ayah Drs. Hendri Dunant dan ibu Rosmiana, terima kasih yang tak sehingga atas segala kasih sayang, cinta, perhatian, dorongan semangat, bantuan baik moril maupun materil dan segala-galanya kepada ananda selama ini.
2. Bapak Drs. Abrar, Msi, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIR
3. Ibu Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si selaku ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UIR
4. Bapak Drs. M. Nur. MM selaku dosen pembimbing I yang tak pernah lelah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini selesai.
5. Ibu Hj. Nawarti Bustamam, SE. M.Si selaku dosen pembimbing II yang tidak berhenti memberikan motivasi, memperbaiki dan menyempurnakan sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan pada waktunya.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama dibangku kuliah serta karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ekonomi UIR yang telah ikut membantu proses kegiatan belajar mengajar dikampus
7. Pimpinan beserta staff karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Cabang Pekanbaru, yang telah bersedia memberi

kemudahan dalam pengambilan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

8. Terima kasih untuk teman dekatku Chenny Eka Afrintya. S.IP serta teman-teman angkatan 2013 di Fakultas Ekonomi Pembangunan UIR dan teman-temanku lainnya yang tidak bisa dijelaskan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan support selama ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, September 2019

Penulis

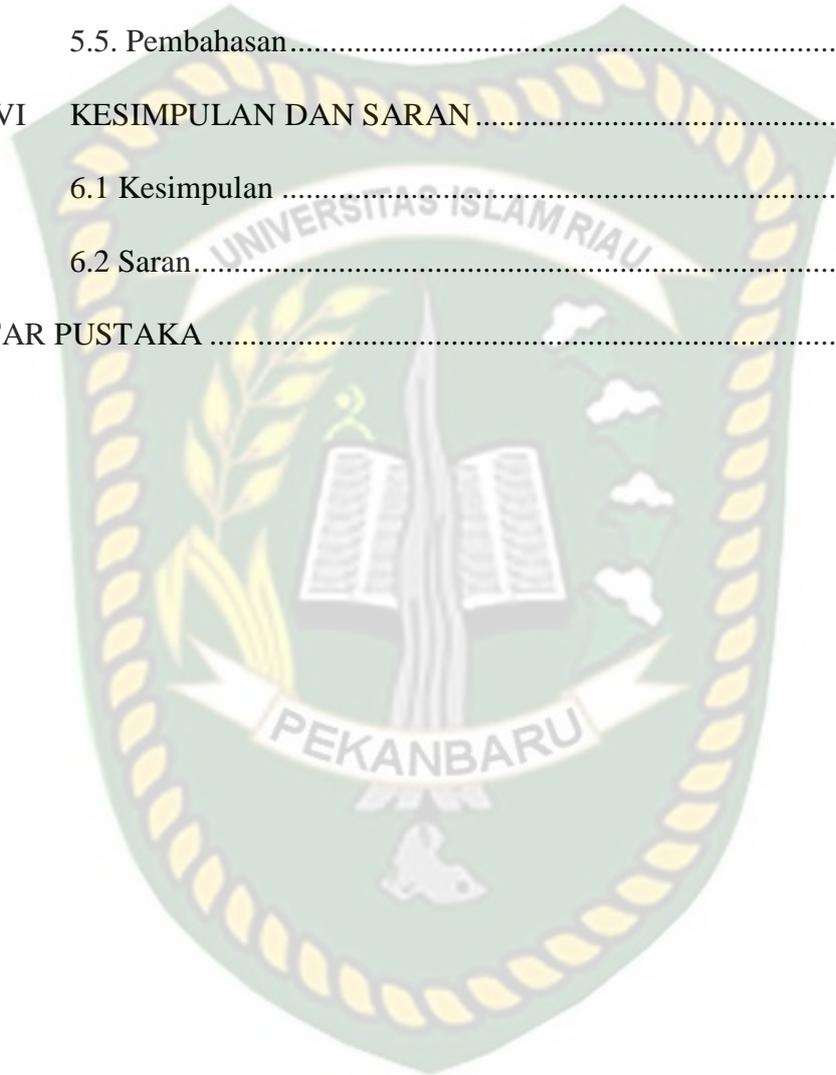
GUSTI RANDA

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....	13
2.1. Pengertian Bank.....	13
2.2. Jenis Lembaga Perbankan.....	15
2.3. Jenis Usaha dan Kegiatan Bank.....	18
2.4. Teori Permintaan.....	20
2.5. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan .....	22
2.6. Kredit .....	22
2.7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit .....	25
2.8. Unsur-unsur Kredit .....	27
2.9. Fungsi dan Tujuan Pemberian Kredit .....	29
2.10. Jenis-Jenis Kredit .....	30
2.11. Aspek Penilaian Kredit.....	34

	2.12. <i>The Five C'of Credit</i> .....	35
	2.13. Dampak Kredit Terhadap Peningkatan Usaha .....	37
	2.14. Pengertian Usaha Kecil .....	38
	2.15. Penelitian Terdahulu .....	40
	2.16. Hipotesis .....	42
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN .....	43
	3.1. Lokasi penelitian .....	43
	3.2. Jenis dan sumber data .....	43
	3.3. Populasi dan Sampel .....	44
	3.4. Metode Pengumpulan Data .....	44
	3.4. Analisis Data .....	45
BAB IV	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....	46
	4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	46
	4.2. Jumlah dan Luas Kecamatan di Kota Pekanbaru .....	47
	4.3. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Pekanbaru .....	49
	4.4. Sejarah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau .....	52
	4.5. Produk – Produk PT. BPR Mitra Rakyat Riau .....	53
	4.6. Struktur Organisasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau .....	56
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	72
	5.1. Identitas Responden .....	72
	5.2. Dampak Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau terhadap pendapatan .....	75

5.3. Dampak kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau terhadap Jumlah Tenaga Kerja .....	79
5.4. Dampak Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau terhadap modal usaha kecil di Kota Pekanbaru.....	80
5.5. Pembahasan.....	83
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	86
6.1 Kesimpulan .....	86
6.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	88



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Perkembangan Kredit Untuk Usaha Kecil Menurut Bentuk Usaha Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Pada Jumlah Penerimaan Kredit Tahun 2013-2017 (orang) .....	8
Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 4.1.	Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan Tahun 2017.....	48
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan Tahun 2017 .....	50
Tabel. 5.1	Usia Responden Dirinci Menurut Kelompok Umur Tahun 2018 .....	73
Tabel 5.2	Tingkat Pendidikan Responden di Pekanbaru Tahun 2018.....	74
Tabel 5.3	Klasifikasi Pendapatan pada usaha kecil Sebelum Memperoleh Kredit Dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Tahun 2018 .....	75
Tabel 5.4	Klasifikasi Pendapatan pada usaha kecil Setelah Memperoleh Kredit Dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Tahun 2018.....	77
Tabel 5.6	Peningkatan tenaga kerja sebelum dan sesudah memperoleh Kredit Dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Tahun 2018.....	79
Tabel 5.8	Keadaan Modal Usaha responden Sebelum Mandapat Fasilitas Kredit Dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Tahun 2018.....	81
Tabel 5.9	Keadaan Modal Usaha responden Sesudah Mandapat Fasilitas Kredit Dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Tahun 2018.....	82

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perekonomian tidak terlepas dari industri jasa perbankan. Bank merupakan lembaga intermediasi antara masyarakat yang mempunyai saving dengan masyarakat yang membutuhkan modal finansial baik pada Bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu lembaga yang berfungsi sebagai stimulan yang esensial dalam mengembangkan usaha pada skala mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Perbarindo Riau selaku organisasi wadah insan management Bank Perkreditan Rakyat di daerah Riau, telah berupaya mengembangkan Bank Perkreditan Rakyat secara bersama. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat baik yang beroperasi dengan sistem konvensional maupun yang beroperasi dengan sistem syariah, memang diarahkan pada sektor usaha atau sastra masyarakat pada skala mikro kecil dan menengah juga yang masih tergolong pada usaha informal. Keberadaan dari sektor usaha informal tersebut sebagian besar berada pada daerah pedesaan, namun tidak terpungkiri bahwa masyarakat pada sektor usaha mikro kecil dan menengah juga sangat banyak berada di kota-kota, termasuk kota Pekanbaru. Keberadaan usaha informal di kota-kota masih banyak yang belum tersentuh oleh usaha jasa Bank umum yang berada di kota-kota.

Usaha pemerintah untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada sektor informal tersebut telah dapat dukungan Pemerintah

Republik Indonesia dan Bank Indonesia antara lain :

1. Pemerintah Indonesia telah merencanakan KUR melalui Bank Pemerintah.
2. Pemerintah daerah telah pula meluncurkan program ekonomi kerakyatan.
3. Bank Indonesia telah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat dengan tujuan agar Bank Perkreditan Rakyat yang selama ini kesulitan dalam memperoleh dana pihak ketiga telah menghimbau pada Bank Umum untuk dapat kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat dalam upaya mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah, baik yang ada di pedesaan maupun yang ada di kota.
4. Bank Indonesia Pekanbaru juga telah mendorong Bank Riau untuk dapat berfungsi sebagai Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Riau bersama Perbarindo Riau.

Semua hal tersebut merupakan wujud dari usaha Pemerintah untuk memacu pertumbuhan prekonomian pada skala usaha mikro kecil dan menengah. Dengan demikian dapatlah dilihat bahwa keberadaan Bank Perkreditan Rakyat tersebut adalah berperan sangat strategis dalam melayani UMKM dan masyarakat usaha sektor informal dengan prosedur sederhana, proses singkat, pendekatan personal,serta kedekatan lokasi dengan nasabah.

Dari sisi Bank Perkreditan Rakyat sendiri diharapkan:

1. Menjadi ujung tombak pembiayaan kepada UMKM dan masyarakat dan usaha sektor informal.

2. Mendukung mengembangkan ekonomi pedesaan yang sehat, kuat, dan produktif.
3. Memberikan pelayanan kepada UMKM secara merata di Propinsi Riau.

Dilain pihak posisi Bank Perkreditan Rakyat dalam arsitektur perbankan Indonesia adalah sebagai bagian dari program pengetahuan struktur perbankan Nasional. Membuka kerjasama dari berbagai pihak untuk bersama secara sehat dan saling menguntungkan dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di Propinsi Riau.

Menurut Sinungan (2001:13) pengertian kredit adalah merupakan pemberian suatu prestasi oleh suatu pihak kepada pihak yang lain dan kemudian prestasi tersebut dikembalikan lagi pada suatu tertentu pada masa yang akan datang dan disertai dengan suatu prestasi berupa bunga.

Kredit yang diberikan oleh Bank berdasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karenanya pemberian kredit oleh Bank dimaksudkan salah satu usaha Bank untuk mendapatkan keuntungan, maka Bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul yakin bahwa sidebitur akan mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya sesuai sidebitur akan mengembalikan pinjaman yang telah di terimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Pemberian kredit diberikan tidak saja untuk pengusaha golongan ekonomi menengah ke atas, tetapi juga dapat diberikan kepada masyarakat atau pengusaha

golongan ekonomi menengah kebawah, seperti pengusaha-pengusaha kecil yang bergerak di bidang usaha kecil.

Usaha kecil melakukan usaha dibidang perdagangan eceran seperti kegiatan-kegiatan pertokoan biasa, perdagangan eceran di kios, perdagangan keliling yang berhubungan langsung dengan produsen kecil. Usaha kecil juga meliputi industri kecil yang menggunakan ketrampilan tradisonal dan penghasil benda-benda seni, seperti kerajinan yang pada umumnya diusahakan oleh rakyat Indonesia dari golongan ekonomi lemah. Oleh karena itu usaha industri ini hanya dapat di usahakan oleh warga Negara Republik Indonesia.

Sektor usaha kecil merupakan satu lapangan bagi kegiatan ekonomi bagi jutaan penduduk Indonesia dewasa ini dan masa yang akan datang. Maka tenaga kerja yang dan pengusaha yang tergolong rakyat kecil dan lemah dalam berbagai hal lemah dalam organisasi dan manajemen, lemah dari segi modal dan lain sebagainya sudah selayaknya mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari pemerintah agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kekuatan dalam pembangunan ekonomi.

Salah satu faktor utama yang merupakan kendala bagi pengembangan usaha kecil adalah masalah permodalan. Masalah permodalan yang di hadapi usaha kecil tidak hanya mengenai sumber dana. Tetapi juga kemampuan untuk mengarahkan dana sendiri, dengan demikian peningkatan kemampuan permodalan usaha kecil dapat mencangkup tentang peningkatan aksesnya kepada dana dan perbaikan struktur permodalannya.

Peningkatan akses kepada sumber-sumber dana di tempuh melalui

peningkatan peran sektor jasa keuangan, baik milik pemerintah maupun milik swasta. Dengan meningkatnya efektifitas Bank Umum melalui penyaluran kredit bagi usaha kecil agar semakin mampu mendukung dan mengembangkan usaha kecil.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah tersebut berarti perbankan turut serta memberikan sumbangan yang cukup berarti khususnya dalam membatu perkembangan sektor usaha kecil, terutama dalam penyaluran sebagai penyaluran kredit kecil. Kebijakan Perkreditan ini ditujukan untuk lebih menjamin tersedianya dana bagi pembiayaan usaha kecil. Dari pengalaman, pelaksanaan kebijaksanaan kredit tersebut selama ini telah memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi dan pendapatan bagi sektor tersebut.

Namun demikian disadari bahwa saat ini masih ada keluhan dari sebagian masyarakat (usaha) kecil mengenai sulitnya memperoleh kredit atau akses pada Bank. Hal ini menunjukkan bahwa kredit belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, yang disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi baik dari pihak pengusaha kecil maupun pihak Bank.

Dari sisi pemerintahan, umumnya kendala nasabah usaha kecil untuk memperoleh kredit adalah belum mampu mengungkapkan kelayakan usahanya, adanya keterbatasan pada aspek pemasaran, teknis produksi, menejemen produksi, serta belum mampu memenuhi persyaratan teknis Bank. Antara lain jaminan dan perizinan. Sedangkan dari sisi perbankan beberapa kendala dalam penyaluran kredit adalah tingginya biaya transaksi, sulitnya memperoleh usaha kecil yang

layak, tingginya risiko dan terbatasnya jaringan kantor cabang Bank. Adapun jumlah BPR yang ada di Pekanbaru sebanyak 16 BPR antara lain meliputi :  
(www.BPR.com.id:2012)

1. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA RAKYAT RIAU
2. PT.BPR CWS (CEMPAKA WADAH SEJAHTERA)
3. PT. BPR UNISRITAMA
4. PT. BPRS. BERKAH DANA FADLILLAH
5. PT. BPRS. HASANAH
6. PT. BPR PAYUNG NEGERI BESTARI
7. PT. BPR. MITRA RIAU
8. PT. BPR FIANKA REZALINA FATMA
9. PT.BPR TUAH NEGERI MANDIRI
10. PT. BPR PEKANBARU
11. PT. BPR MANDIRI JAYA PERKASA
12. PT.BPR HARTA MANDIRI
13. PT. BPR DELTA DANA MANDIRI
14. PT. BPR INDO MITRA
15. PT. BPR ARTHA MARGAHAYU
16. PT BPR TUNAS MITRA MANDIRI

Pengusaha kecil maupun perbankan memiliki hambatan dalam pengembangan usaha kecil. Namun demikian, di kota Pekanbaru dapat dilihat peranan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau dalam meningkatkan usaha kecil cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada ruang lingkup kegiatan PT.

Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau yang salah satunya memberikan berbagai fasilitas Perkreditan kepada dunia usaha dan pihak lainnya yang membutuhkan.

Kehadiran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau adalah sebagai alternatif pemecahan masalah terutama masalah permodalan yang dihadapi golongan usaha kecil sangat banyak membantu. Selain itu dengan penyaluran kredit yang diberikan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau terhadap pengusaha kecil telah dapat memberikan perbaikan perekonomian pengusaha kecil terutama dalam peningkatan pendapatan.

Sebagai kebijakan dari Pemerintah, yaitu melalui PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau sebagai lembaga jasa yang terintimidasi, menghubungkan pelaku ekonomi yang kelebihan dana dengan pelaku ekonomi yang membutuhkan dana. Peran perbankan baru terlihat secara berarti apabila dikaitkan dengan fungsi kredit sebagai pelumas jalannya perekonomian. Apabila terlalu cepat pertumbuhannya akan menyebabkan Inflasi. Sebaliknya, apabila pertumbuhannya lambat akan menimbulkan kelesuhan usaha. Evaluasi dan analisa Perkreditan sebaiknya dilihat sebagai konteks sumbangannya terhadap pembangunan yang merata, pertumbuhan ekonomi yang stabil serta stabilitas nasional.

Dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit usaha kecil kepada para nasabah, PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau dihadapkan pula pada serangkaian permasalahan yang cukup kompleks. Selain masalah-masalah yang harus dipecahkan perbankan dalam pemberian kredit, para pengelola kredit pun

dihadapi dengan masalah-masalah yang sangat spesifik menyangkut kegiatan usaha dari calon debiturnya.

Perkreditan mempunyai sifat yang kasuistis, artinya masing-masing (calon) debitur mempunyai permasalahan yang spesifik. Oleh karena itu, antara satu nasabah dengan nasabah lain diperlukan adanya pendapatan dan penanganan secara berbeda dan sangat memperhatikan ciri-ciri khusus dari usahanya.

Apabila ditinjau dari perkembangan jumlah kredit yang disalurkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau pada periode tahun 2013-2017 tampak adanya peningkatan yang pesat sebagaimana yang tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 1. : Perkembangan Kredit Untuk Usaha Kecil Menurut Bentuk Usaha Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Pada Jumlah Penerimaan Kredit Tahun 2013-2017 (orang)

No	Jenis Kredit	Jumlah Penerimaan Kredit					Jumlah (orang)
		2013 (orang)	2014 (orang)	2015 (orang)	2016 (orang)	2017 (orang)	
1	Kredit Wirausaha	6	8	131	150	154	449
2	Kredit Kesejahteraan	4	2	9	95	11	121
3	Kredit Agribisnis	-	-	-	-	27	27
4	Kredit Usaha Kecil	4	5	189	127	47	501
5	Kredit Anggota Koperasi	-	-	-	-	5	5
	Jumlah	14	15	424	476	567	1496

Sumber: PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 5 kredit yang disalurkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau pada tahun 2013 ada sebanyak 14 kredit usaha, tahun 2015 sebanyak 15 kredit usaha, kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah kredit usaha yaitu sebanyak 424 usaha, pada tahun

2016 terus mengalami peningkatan kembali sebanyak 476 usaha dan tahun 2017 ada sebanyak 567 kredit usaha. Dari data tersebut diketahui kredit yang paling banyak diminati oleh pengusaha kecil adalah kredit wirausaha sebanyak 154 unit usaha karena banyak pengusaha yang bergerak di bidang usaha kecil menengah.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau memberikan kredit Bakulan hanya kepada pedagang kecil saja. Seperti pedagang keliling, pedagang eceran, pedagang kaki lima dan lain lain. Sehingga PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau dapat mengembangkan usaha mereka yang dilihat dari aspek modal, pendapatan/keuntungan, dana, tenaga kerja di Kota Pekanbaru.

Banyaknya jumlah kredit yang disalurkan kepada 6 bentuk usaha kecil di atas disebabkan mata pencarian dari masyarakat Kota Pekanbaru terbanyak dibidang pedagang kecil, wirausaha, agribisnis sehingga tidaklah mengherankan bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau memberikan atau menyalurkan kredit usaha kecil kepada 3 bentuk usaha kecil tersebut di atas.

Prinsip dasar pemberian kredit kepada pengusaha kecil diatas diberikan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau cabang Pekanbaru. Adalah melihat dari kepribadian dari peminjam, pengalaman bisnis dalam menyesuaikan diri dengan kondisi prekonomian atau ketentuan pemerintah serta bagaimana kekuatan perusahaan dalam sektor yang dijalani. selain itu distribusi modal juga harus diperhatikan, jaminan yang diberikan pengusaha kecil seras kondisi ekonomi dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau itu sendiri.

Bertitik tolak dari kondisi diatas, jelaslah disini bahwa penyaluran kredit untuk para pengusaha kecil secara nyata harus mendapatkan dukungan dari

lembaga perbankan agar peningkatan usaha yang diharapkan pengusaha kecil dapat tercapai. Berdasar uraian pada latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk penelitian dengan judul :“DAMPAK KREDIT TERHADAP PENINGKATAN USAHA KECIL (STUDI KASUS PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA RAKYAT RIAU CABANG PEKANBARU)”

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini menulis adalah sebagai berikut :

“Bagaimana dampak kredit terhadap peningkatan usaha kecil (studi kasus PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Cabang Pekanbaru) “.

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Untuk mengetahui dampak kredit terhadap peningkatan usaha kecil (studi kasus PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Cabang Pekanbaru)”

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai masukan bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Pekanbaru untuk menetapkan kebijakan dalam pemberian kredit usaha kecil yang akan berdampak pada peningkatan usaha tersebut.

2. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti berikutnya sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang berikut.
3. Sebagai sarana dan wadah bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Secara garis besarnya penulisan ini akan dibagi kedalam enam bab, masing-masing akan dirinci dalam sub bab berikut ini:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS**

Pada bab ini akan diuraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit, penelitian terdahulu dan hipotesis.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data.

##### **BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

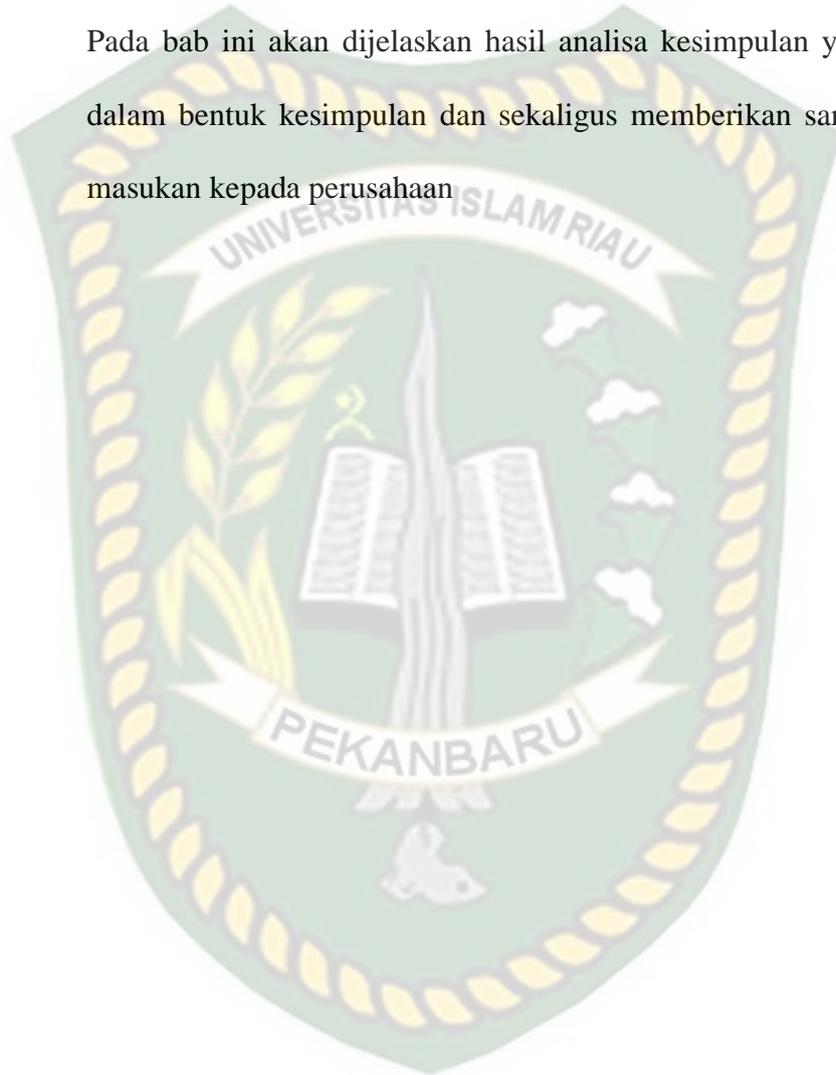
Pada bab ini akan dijelaskan tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan serta aktivitas perusahaan.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dibahas analisis data tentang hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan dijelaskan hasil analisa kesimpulan yang ditarik dalam bentuk kesimpulan dan sekaligus memberikan saran sebagai masukan kepada perusahaan



## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN HIPOTESA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1 Pengertian Bank

Kata bank berasal dari bahasa Latin, “*banco*” yang artinya bangku atau meja. Pada awalnya para pedagang menitipkan sebagian lempengan emas mereka di tempat pembuatan emas yang dilakukan di atas *banco* (meja) untuk menghitung dan memberikan tanda bukti penyimpanannya. Dalam perjalanannya kemudian, surat tanda bukti penyimpanan tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai surat tagih yang sewaktu-waktu dapat ditukar dengan emas pada tempat penyimpanan tadi. Surat tagihan tadi seakan-akan berfungsi sebagai uang kertas, walaupun sebenarnya hanyalah berupa wesel atau cek saja. (Judisseno, 2002: 92-93)

Fungsi yang dijalankan bank sangat beragam sehingga sulit membuat definisi bank yang berlaku secara umum. Akan tetapi fungsi utama bank adalah untuk melayani peminjaman dan penyimpanan uang. Di satu pihak, bank meminjam uang, tetapi di pihak lain, bank meminjamkan uang. Kini bank-bank umumnya mengkhususkan pelayanannya dalam bidang-bidang yang khusus seperti pertanian, industri atau perdagangan luar negeri. Bank komersial melayani masyarakat umum dan juga masyarakat dagang. (Wirasmita, 2002: 16)

Penulis lain mendefinisikan bank sebagai suatu badan yang usahanya menciptakan kredit. Menurut G.M. Venyn Stuart dalam bukunya “*Bank Politics*”

mengatakan, “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral” (Suyatno, 2003: 1)

Bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga keuangan yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan pinjaman uang untuk pihak ketiga (Asikin, 2005: 4)

Defenisi bank menurut Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank di atas menggambarkan bahwa bank dibebani suatu misi dalam perekonomian Indonesia, yakni meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Artinya, dana yang dihimpun perlu dialokasikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit agar daya beli dan atau modal usaha masyarakat dapat meningkatkan laju dan pemerataan pembangunan ekonomi. (Judisseno, 2002: 146)

Dilihat dari fungsinya pula, berbagai macam defenisi tentang bank itu dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Bank dilihat sebagai penerima kredit. Kredit dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan biasa, deposito berjangka, simpanan dalam rekening koran/giro. Pengertian pertama ini mencerminkan bahwa bank melaksanakan

operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.

- 2) Bank dilihat sebagai pemberi kredit. Ini berarti bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Jadi, fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber dari penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.
- 3) Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank. (Dermawan, 2005: 4)

#### 2.1.2. Jenis Lembaga Perbankan

Dalam praktek perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-undang Perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan No. 14 tahun 1967 maka terdapat beberapa perbedaan. Namun kegiatan utama atau pokok sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan nomor 14 tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari: bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai dan lain-lain. Namun setelah keluarnya Undang-undang Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan dilihat dari segi fungsinya terdiri dari Bank Umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Dimana Bank Pembangunan dan Bank Tabungan

berubah fungsinya menjadi Bank Umum sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut:

#### 1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan/usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*). (Reed, 2005: 4)

Fungsi utama bank umum adalah pemberian kredit pada peminjam yang dapat dipercaya. Sejak dari permulaan, pendirian bank didorong oleh kesempatan yang diberikan oleh fungsi pemberian pinjaman. Dan izin pendirian diberikan oleh pemerintah terutama karena adanya kebutuhan kredit pada suatu lingkungan. Dalam pemberian kredit, bank umum memberi pelayanan sosial yang besar melalui kegiatannya. Produksi dapat ditingkatkan, investasi barang modal diperluas dan standar hidup yang lebih tinggi dapat dicapai.

#### 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum.

Seperti halnya kredit, bank dapat juga dilihat dari berbagai segi. Dilihat transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque* dan transaksi luar negeri lainnya. Jenis bank ini ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu Bank non devisa, bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri seperti halnya bank devisa.

Dilihat dari segi cara menentukan harga, bank dapat dibedakan menjadi:

- 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, menggunakan dua metode:
  - a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan kredit, maupun deposito. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Jika suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan *negative spread*.
  - b) Menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase untuk jasa-jasa bank lainnya (*fee based*).
- 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah, menggunakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain, dengan metode:
  - a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
  - b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
  - c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
  - d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
  - e) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

### 2.1.3. Jenis Usaha dan Kegiatan Bank

Jenis usaha bank umum ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Memindahkan uang, baik melalui pemberitahuan telegram maupun dengan surat ataupun dengan jalan memberikan wesel tunjuk diantara sesama kantor.
- 2) Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran, menjalankan perintah untuk memindahkan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- 3) Mendiskontokan surat wesel, kertas perbendaharaan atas beban negara dan jenis-jenis surat berharga lainnya.
- 4) Memberikan kredit, terutama dengan tanggungan efek, hasil bumi, barang dan juga dengan tabungan dokumen pengangkutan dan dokumen penyimpanan yang mewakili barang tersebut serta memberi kredit dengan jangka menengah dan panjang untuk tujuan produksi, sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
- 5) Memberikan jaminan bank (*bank guarantee*) dengan tanggungan yang cukup.
- 6) Menjalankan usaha-usaha lain yang lazim dilakukan oleh bank umum. (Suyatno, dkk, 2003: 10-11)

Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia dewasa ini adalah:

- 1) Kegiatan-kegiatan Bank Umum:
  - a) Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk: simpanan giro (demand deposit), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*).
  - b) Menyalurkan dana masyarakat (*lending*) dalam bentuk: kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.
  - c) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) seperti: kiriman uang (*transfer*), inkaso (*collection*), kliring (*clearing*), *save deposit box*, *bank card*, *bank notes*, bank garansi, referensi bank, *bank draft*, *letter of credit* (L/C), cek wisata, dan jasa-jasa lainnya.
- 2) Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat:
  - a) Menghimpun dana dalam bentuk: tabungan dan deposito.
  - b) Menyalurkan dana dalam bentuk: kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan.
  - c) Larangan-larangan bagi bank perkreditan rakyat adalah sebagai berikut: menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing, melakukan kegiatan perasuransian..
- 3) Kegiatan-kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing:
  - a) Dalam mencari dana, Bank Asing dan Bank Campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.
  - b) Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti: perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing dan campuran, kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh Bank

Swasta Nasional.

- c) Untuk jasa-jasa bank lainnya dapat juga dilakukan oleh Bank Umum Campuran dan Bank Asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia.

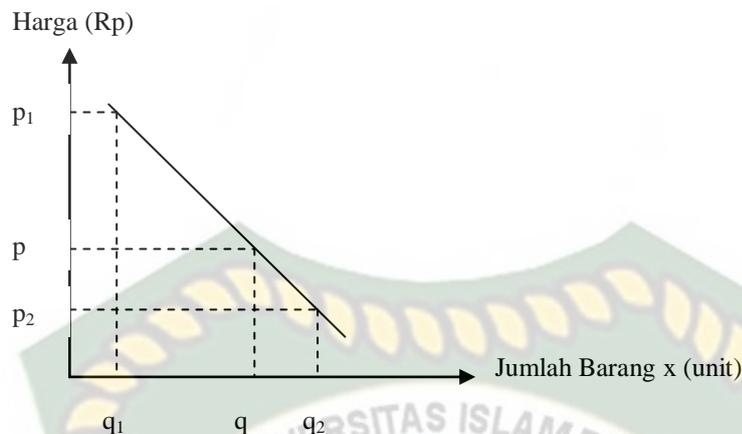
#### 2.1.4. Teori Permintaan

Untuk menerangkan langkah pertama dalam interaksi antara para pembeli dengan para penjual sebaiknya harus dipahami terlebih dahulu tentang teori permintaan dan teori penawaran. Teori permintaan menerangkan sifat dari permintaan pembeli atas suatu barang produk, sedangkan teori penawaran menerangkan tentang sifat penjual dalam menawarkan suatu barang /produk yang akan dijualnya. Dengan menggabungkan permintaan pembeli dan penawaran penjual dapatlah disimpulkan bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual dalam menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang/produk yang akan diperjual belikan.

Hukum permintaan berbunyi sebagai berikut : “ makin rendah harga suatu barang maka makin banyak jumlah permintaan akan barang tersebut, sebaliknya makin tinggi harga barang tersebut maka banyaknya jumlah permintaan atas barang tersebut akan menjadi berkurang atau sedikit.

Berdasarkan ciri-ciri hubungan ini akan dapat dibuat grafik/kurva permintaan, sebagai berikut:

Gambar 1.: Kurva Permintaan Terhadap Barang X



Sesuai dengan hukum permintaan, jika harga barang x mengalami peningkatan dari tingkat harga yang semula  $p$  rupiah menjadi  $p_1$  rupiah, maka jumlah barang x yang diminta akan menurun dari  $q$  menjadi  $q_1$  unit. Sebaliknya jika harga barang x mengalami penurunan  $p_2$  rupiah, maka jumlah barang x yang diminta mengalami peningkatan sebesar  $q_2$  unit.

Para ahli ekonomi membedakan pemakaian istilah fungsi permintaan dan kurva permintaan. Fungsi permintaan menghubungkan kuantitas yang diminta dengan harga barang tersebut juga dengan faktor-faktor lainnya yang besar pengaruh terhadap permintaan, seperti: pendapatan konsumen yang bersangkutan, harga barang pengganti, harga barang komplementer dan citarasa. Kurva permintaan hanya menghubungkan kuantitas yang diminta dengan harga suatu barang tersebut.

Keynes menyatakan, bahwa permintaan uang kas untuk tujuan transaksi tergantung pada pendapatan. Makin tinggi pendapatan, maka makin besar keinginan akan uang kas untuk transaksi. Seseorang atau masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi, biasanya melakukan transaksi yang lebih banyak

dibandingkan seseorang atau masyarakat yang tingkat pendapatannya lebih rendah. Keynes juga berpendapat bahwa permintaan uang juga ditentukan oleh tingkat suku bunga terutama permintaan uang untuk spekulasi, makin tinggi tingkat bunga maka makin rendah keinginan masyarakat akan uang kas (Nopirin, 2000 ; 119).

#### 2.1.5. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan.

Permintaan dalam ekonomi adalah kombinasi harga dan jumlah suatu barang yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga suatu periode tertentu. Permintaan suatu barang sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan harga barang tersebut. Apabila harga barang naik sedang pendapatan tidak berubah maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, jika harga barang turun, sedang pendapatan tidak berubah maka permintaan akan barang akan mengalami kenaikan atau bertambah (Sukirno, 2005 ;114)

Penjelasan mengenai perilaku konsumen yang paling sederhana ada dalam hukum permintaan yang menyatakan bahwa, bila harga suatu barang naik (*ceteris paribus*) maka, jumlah barang yang diminta konsumen tersebut akan naik. *Ceteris paribus* berarti bahwa semua faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta dianggap tidak berubah.

#### 2.1.6. Kredit

##### a. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "*credere*" yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau

suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa si penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikannya. Apakah berupa barang, uang ataupun jasa.

Di beberapa literatur disebutkan istilah kredit berasal dari bahasa Latin *credo* atau *credere*, yang berarti kepercayaan atau *trust*. Kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari pihak pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman, bahwa di masa datang akan mampu memenuhi segala kewajiban yang telah diperjanjikan (Rivai dan Veithzal, 2007). Beberapa pengertian tentang kredit secara luas, antara lain:

1. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati.
2. Kredit adalah pertukaran sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang, barang maupun jasa dengan keyakinan bahwa yang bersangkutan akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama dimasa yang akan datang.
3. Kredit adalah kemampuan pinjaman dan merupakan sebagian dari sumber penting bagi likuiditas, serta merupakan suatu *asset* yang dapat dikelola bagi usaha produksi suatu perusahaan.

Dalam arti ekonomi kredit dapat diartikan sebagai penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa tersebut. Dengan akan diterimanya kontra prestasi pada masa yang akan datang, maka jelas tergambar bahwa faktor waktu merupakan faktor utama yang

memisahkan prestasi dan kontra prestasi. Atau dengan perkataan lain kredit itu dapat pula berarti bahwa pihak pertama memberikan prestasi berupa barang, uang ataupun jasa kepada pihak lain, sedangkan kontra prestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu). Dalam hitungan ini, Raymond P. Kent dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa: “Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1967 yang diperbaharui dengan UU RI No. 10 tahun 1998 pasal 1 angka 11, mengenai pokok-pokok perbankan: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Ikatan Akuntan Indonesia (2004:314) mendefinisikan kredit sebagai berikut: Kredit adalah pinjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Hal yang termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement* (NPA).

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank sebagai kreditur dan nasabah penerima kredit sebagai debitur, dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat.

#### 2.1.7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit

Manusia adalah *homo economicus* dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beranekaragam sesuai dengan hakekatnya selalu meningkat sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya yaitu bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal. Sebagai lembaga keuangan, peranan bank dalam perekonomian sangatlah dominan. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya. Begitu dominannya pemberian kredit bank, sampai banyak ahli berpendapat bahwa tidak satupun usaha bisnis di dunia ini yang bebas dari kredit. Bahkan negara-negara kayapun banyak memerlukan kredit dari lembaga-lembaga keuangan internasional, apalagi negara-negara menengah dan miskin.

Bila kita menyempatkan diri melihat kepada cara manusia berusaha atau bekerja, akan ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan kredit, seperti:

1. Perkembangan ekonomi negara dan daerah serta pengaruhnya terhadap dunia usaha pada umumnya.
2. Keadaan atau situasi perdagangan pada umumnya dan pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak.
3. Tingkat kemakmuran manusia yang berpenghasilan tetap.  
([www.jbptgunadarma.com](http://www.jbptgunadarma.com): 25-26)

Bila ekonomi negara itu berkembang, maka ekonomi daerahnyapun akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan serta pengembangan dunia usaha. Situasi ini sangat memungkinkan peningkatan permintaan kredit dan mendorong jalannya perkreditan yang sehat, baik dalam pelayanannya, penyalurannya maupun dalam pengembaliannya. Begitu pula sebaliknya, bila ekonomi negara itu sedang tidak berkembang, dunia usaha pada umumnya lesu, permintaan terhadap kredit akan menurun, diiringi tingkat pengembalian kredit yang kurang lancar.

Situasi perdagangan pada umumnya akan memberikan refleksi terhadap kemajuan atau kemunduran ekonomi. Meningkatnya perdagangan mengakibatkan meningkatnya permintaan akan berbagai jenis barang atau jasa yang mau tidak mau, meningkatkan permintaan produsen untuk barang atau jasa yang akan dihasilkannya, dimana pembayarannya pun akan meningkat, sehingga permintaan akan kredit meningkat, diiringi dengan pengembalian kredit yang lancar. Akan tetapi bila keadaan perdagangan lesu maka keadaan sebaliknyaalah yang terjadi.

Tingkat kemakmuran manusia yang berpenghasilan tetap, turut berperan dalam menunjukkan kenaikan dan penurunan permintaan akan kredit serta

kesehatan perkreditan manakala pihak-pihak yang berpenghasilan mempunyai kunci kemakmuran yang cukup tinggi karena kebutuhan konsumtifnya rata-rata terpenuhi, namun bila tingkat kemakmuran mereka menurun, maka yang terjadi adalah yang sebaliknya.

Menurut Suyatno, dalam bukunya yang berjudul Kelembagaan Perbankan menyebutkan bahwa permintaan kredit dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- 1) Tingkat/suku bunga
- 2) Kondisi Perekonomian (Suyatno, dkk, 2003:49-50)

Hal ini didukung oleh Yudanto dalam tulisannya yang menjelaskan bahwa kredit dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dimana kredit tersebut dipengaruhi oleh tingkat/suku bunga. (Yudanto, 2008:134) Sedangkan Abdullah, menjelaskan bahwa adanya tekanan terhadap perekonomian menyebabkan kredit menjadi lambat pertumbuhannya karena pada saat kondisi perekonomian kurang stabil tingkat suku buriga kredit naik sehingga kredit terhambat penyalurannya. (Abdullah, 2006:19)

#### 2.1.8. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah:

1. Kepercayaan, artinya kepercayaan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari masa yang akan datang.
3. Kesepakatan, di dalam kredit terdapat unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
4. Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian kredit. Hal ini dapat menyebabkan siiatu resiko tidak tertagihnya pemberian kredit (kredit macet). Semakin panjang suatu kredit maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun resiko yang tidak disengaja.
5. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan

bagi bank berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

#### 2.1.9. Fungsi dan Tujuan Pemberian Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan dan fungsi tertentu.

Adapun yang menjadi tujuan pemberian kredit tersebut adalah :

##### a. Mencari keuntungan

Keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank dan memperluas usaha bank.

##### b. Membantu usaha nasabah

Bank memberikan fasilitas kredit untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan dimana bank memperoleh bunga dan nasabah dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

##### c. Membantu pemerintah

Pemerintah menerima pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank, meningkatkan devisa Negara apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor, dan membuka kesempatan kerja bila kredit yang diberikan digunakan untuk membuka usaha baru.

Fungsi kredit secara luas sebagaimana yang dikemukakan oleh Veithzal dan Andria (2007:8) yaitu :

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang
- d. Untuk meningkatkan peredaran barang
- e. Sebagai stabilitas ekonomi
- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional
- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

#### 2.1.10. Jenis-Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain :

- a. Dilihat dari tujuan penggunaan, terdiri dari :
  1. "Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah atau pabrik," Veithzal dan Andria (2007:15). Kredit ini memerlukan proses penyelesaian jangka panjang, seperti yang dikemukakan Teguh (2006:105) kredit investasi akan memakan proses penyelesaian jangka panjang karena proses produksi juga dalam jangka panjang, sedangkan di sisi lain harga-harga barang modal saat pengadaan cukup mahal. Oleh karena itu pelunasan harus dilakukan bertahap sesuai kemampuan perusahaan

nasabah untuk menyisihkan saldo uang kasnya. Kredit ini memerlukan biaya operasional dan administrasi serta *unceertainty risk* yang besar.

2. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya seperti membeli bahan baku atau membayar gaji pegawai. Menurut Teguh (2006:105) "kredit modal kerja diberikan dalam jangka waktu pendek sesuai dengan siklus usaha dari perusahaan tersebut. Dalam praktik, kredit ini dapat dilakukan perpanjangan; sepanjang nasabahnya mampu memenuhi kewajiban-kewajiban pada bank dengan baik." Menurut Veithzal dan Andria(2007:13), kredit modal kerja terdiri dari beberapa kategori, yaitu:

- a. KMK Ekspor
- b. KMK Perdagangan Dalam Negeri
- c. KMK Industri
- d. KMK Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan
- e. KMK Prasarana / Jasa-Jasa

3. Kredit Konsumtif adalah kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain.

b. Dilihat dari segi jangka waktu, terdiri dari :

1. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun.

2. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun.
3. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

c. Dilihat dari segi cara pemakaiannya, terdiri dari :

1. Kredit rekening koran, yaitu debitur menerima seluruh kreditnya yang dimasukkan kedalam rekening koran dan kepadanya diberikan blangko cek maupun giro, dengan penarikan cek/giro maka si debitur (nasabah) dapat menarik dana pinjamannya. Debitur bebas menarik ataupun menyetor melalui rekening koran yang bersangkutan selama kredit tersebut berjalan.
2. Revolving kredit, yaitu sistem penarikan kreditnya sama dengan cara rekening koran bebas dengan masa penggunaannya 1 tahun, namun sistemnya berbeda dengan syarat pada akhir triwulan pertama saldo pinjaman harus menunjukkan sisa nol pada awal triwulan kedua, nasabah dapat melakukan penarikan secara bebas selama triwulan kedua dan pada akhir triwulan kedua sisa hutang harus kembali nol.
3. Term loan, yaitu hampir sama dengan kredit rekening koran bebas, hanya dari sisi penggunaan pemakaian kredit sangat fleksibel, dimana nasabah bebas mempergunakan dana tersebut untuk keperluan apa saja.

d. Dilihat dari segi jaminan, terdiri dari :

1. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan berupa barang berwujud, tidak berwujud atau jaminan orang.

2. Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu, tetapi diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon nasabah selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

e. Dilihat dari segi penarikannya, terdiri dari :

1. Kredit dengan penarikan sekaligus, yaitu kredit yang diperoleh/ditarik nasabah sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan secara keseluruhan tanpa ada penundaan pencairan dana pinjaman.
2. Kredit dengan penarikan bertahap, yaitu kredit yang diperoleh/ditarik nasabah, dimana pencairan dananya dilakukan secara berkala oleh pihak bank.

f. Dilihat dari segi sifat pelunasannya, terdiri dari :

1. Kredit yang pelunasannya dengan angsuran, yaitu kredit yang diperoleh debitur dapat dicicil dalam pelunasannya sesuai dengan ketentuan dan ikatan kerjasama yang telah disepakati oleh bank dengan debitur.
2. Kredit yang pelunasannya tanpa angsuran, yaitu pembayaran secara keseluruhan terhadap kredit yang diperoleh debitur tanpa adanya cicilan, dimana dalam pelunasan kredit tersebut harus terdapat bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan.

g. Dilihat dari segi sektor usaha, terdiri dari :

1. Kredit pertanian
2. Kredit peternakan
3. Kredit industri

4. Kredit pertambahan
5. Kredit pendidikan
6. Kredit profesi
7. Kredit perumahan
8. Dan sektor-sektor lainnya

Dalam penyaluran kredit, pihak perbankan dan pihak debitur harus menjalin hubungan baik agar segala proses yang akan dilaksanakan dapat berjalan lancar. Dalam hal inilah peran *account officer* diperlukan sebagai point of contract antar bank dengan pihak customer yang memelihara hubungan dengan nasabah dan wajib memonitor seluruh kegiatan nasaabah secara terus menerus. Perbankan harus teliti dalam memberikan fasilitas kepada nasabah. Pertimbangan pemberian fasilitas kepada nasabah harus dipandang secara menyeluruh atas kebutuhannya, baik keperluan *cash loan* maupun non-cash loan dalam suatu periode tahunan.

#### 2.1.11. Aspek Penilaian Kredit

Ada beberapa aspek yang diperlukan perbankan sebagai bahan pertimbangan dalam penyaluran kredit, yaitu :

- 1) Aspek yuridis,
- 2) Aspek pemasaran,
- 3) Aspek manajemen dan organisasi,
- 4) Aspek teknis,
- 5) Aspek keuangan

### 2.1.12. *The Five C's of Credit*

Secara teoritis, *The five C's of credit analysis* ini merupakan pedoman yang baik bagi Bank untuk menghindari terjadinya kredit macet karena mengandung tiga unsur pokok yaitu:

1. Faktor subyektif (moral)
2. Faktor obyektif yang berkenaan dengan organisasi, administrasi modal dan keadaan ekonomi.
3. Faktor yuridis yang berkenaan dengan struktur yuridis dari badan usaha penerima kredit.

Penilaian Bank sebelum mengucurkan kreditnya kepada calon Debitur akan berdasarkan pada faktor-faktor watak (*Character*), jaminan (*Collateral*), modal (*capital*), kemampuan (*capacity*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*) atau yang biasa disebut the 5 C's (*Five C's of credit analysis*). The 5 C's (*five C's of credit analysis*) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Character* (watak), Penilaian terhadap karakter perlu dilakukan untuk mengetahui itikad baik dan kejujuran Nasabah Debitur untuk membayar kembali kredit yang diterimanya.
- b. *Capacity* adalah kemampuan calon Debitur untuk mengendalikan, mengatur dan menguasai bidang usahanya, sehingga dengan demikian diharapkan calon debitur dapat membayar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- c. *Capital* (modal) perlu diketahui jumlah modal yang dimiliki calon Debitur cukup memadai untuk menjalankan usahanya. Kredit Bank berfungsi sebagai tambahan.
- d. *Collateral* (jaminan) adalah barang-barang yang dapat digunakan sebagai jaminan. Barang-barang ini merupakan kekayaan yang dimiliki Debitur yang dapat digunakan sebagai jaminan guna pelunasan hutangnya. Fungsi agunan itu adalah apabila Debitur tidak dapat membayar kreditnya maka agunan ini dapat dijual oleh pihak Bank.
- e. *Condition of Economy* adalah situasi dan kondisi ekonomi pada saat kredit diberikan.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah imbalan berupa bunga atau pembagian keuntungan. (Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998).

Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa:“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya“

Sedangkan kegiatan menghimpun dana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 berbunyi sebagai berikut: Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

#### 2.1.13. Dampak Kredit Terhadap Peningkatan Usaha

Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Meskipun UMKM telah menunjukkan perannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan iklim usaha, baik yang bersifat internal maupun eksternal, contohnya produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan UM, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kebijakan yang ada belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan UM. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 7 ayat 1 menyatakan “Pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan dan perundang-undangan yang meliputi

aspek pendanaan, sarana prasarana dll. Sementara pasal 2 menyatakan “Dunia usaha dan masyarakat berperan secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha.” Dari Undang-Undang tersebut jelas menyatakan bahwa dunia usaha seperti bank, harus berperan aktif dalam pengembangan UMKM dalam hal ini dari segi permodalan dengan penyaluran kredit kepada pelaku UMKM.

Kegiatan perkreditan merupakan kegiatan terbesar dari perbankan, oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dari aktifitas perkreditan, bank akan memperoleh pendapatan operasional berupa pendapatan bunga, provisi dan komisi. Pendapatan bunga merupakan sumber pendapatan terbesar dari bank (Lukman Dendawijaya, 2005: 23). Pendapatan bunga akan diperoleh dari setiap angsuran kredit yang dibayar oleh debitur dalam jangka waktu yang telah disepakati, biasanya setiap bulan. Setiap angsuran kredit yang dibayar, didalamnya sudah termasuk sejumlah pokok pinjaman ditambah dengan sejumlah bunga. Sementara pendapatan provisi diperoleh ketika pencairan kredit, sebesar persentase tertentu dari kredit yang diberikan. Pendapatan operasional merupakan salah satu komponen untuk menentukan besarnya laba operasional yang diperoleh dalam suatu periode. Selain pendapatan, besarnya laba juga dipengaruhi oleh beban.

#### 2.1.14. Pengertian Usaha Kecil

Definisi usaha kecil sampai saat ini berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang yang mengartikannya. Ada yang mengartikan usaha kecil dari sudut pandang modal, omset tahunan, bahkan ada juga yang mendefinisikan dari sudut pandang tenaga kerja, tetapi pada prinsipnya adalah sama. Arif Rahman (2009;

13-14) mendefinisikan usaha kecil adalah sebagai berikut: Usaha dengan modal antara Rp 0 hingga Rp 200 juta, menengah antara Rp 201 hingga Rp 500 juta, dan usaha besar di atas Rp 500 juta.

Departemen Perdagangan dan Perindustrian memberikan batasan usaha kecil sebagai berikut:

Usaha kecil adalah kelompok usaha industri yang memiliki investasi peralatan dibawah tujuh puluh juta rupiah, investasi pertenaga kerja maksimal enam ratus lima puluh dua ribu rupiah, jumlah tenaga kerja 20 orang, serta memiliki asset perusahaan tidak lebih dari seratus juta rupiah.

Sedangkan Biro Pusat Statistik (BPS) memberikan batasan usaha kecil adalah sebagai berikut: Usaha kecil adalah usaha yang difokuskan pada industri manufaktur dengan menyerap tenaga kerja antara 5 - 9.

Menurut *committee for economic development* (dalam Sofyan Syafri Harahap, 2009:9)

yang mendefinisikan perusahaan kecil berdasarkan sifat. Menurut mereka disebut perusahaan kecil jika memenuhi dua dari sifat sebagai berikut:

1. Manajemennya independent
2. Kepemilikan dipegang sendiri atau modal didrop sendiri
3. Kegiatan usaha bersifat lokal, dengan satu pabrik dan kantor pusat
4. Size perusahaan relatif lebih kecil jika dilihat dari keseluruhan industri.

Dari pengertian dan sifat-sifat perusahaan kecil, dapat disimpulkan bahwa didalam perusahaan kecil ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu : (1)

pemusatan kepemilikan dan pengawasan ditangan seseorang atau beberapa orang;  
(2) terbatasnya pemisahan dalam perusahaan.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini dapat dilihat penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Felna Taupan Achmad (2014)	Analisis Permintaan Kredit Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Medan Johor	Dari hasil regresi, variabel modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap variabel pendapatan (kesejahteraan) pengusaha mikro dan kecil, variabel modal kredit berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap variabel pendapatan (kesejahteraan) pengusaha mikro dan kecil, variabel jumlah pekerja berpengaruh negatif secara statistik terhadap variabel pendapatan (kesejahteraan) pengusaha mikro dan kecil. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa variabel tingkat kesejahteraan petani kopi sebagai variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel – variabel independen yaitu modal sendiri, modal kredit, jumlah pekerja sebesar 0,496% sedangkan sisanya sebesar 99,504 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan ke dalam modal estimasi. Pengujian secara keseluruhan menggunakan uji F dimana F

			hitung (8,545) > F tabel (3,35), artinya variabel modal sendiri, modal kredit, luas jumlah pekerja secara serentak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pengusaha mikro dan kecil.
2.	Jumhur (2015)	Analisis Permintaan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil Di Kota Semarang (Studi Kasus Permintaan Modal Kerja Usaha Kecil Sektor Perdagangan dari BMT)	Pengujian dengan Regresi Logistik diperoleh variabel total asset dan tingkat bunga dilembaga keuangan lainnya berpengaruh signifikan terhadap probabilita permintaan kredit modal kerja usaha kecil dari BMT, sedangkan faktor keuntungan perbulan dan rasio bagi hasil tidak signifikan terhadap probablilita usaha kecil meminjam modal kerja dari BMT (Y) pada level signifikansi 5%. Tidak singnifikannya pengaruh keuntungan terhadap (Y) karena pada umumnya usaha kecil jarang menghitung dan memisahkan keuntungan yang diperoleh dari usahanya, karena biasanya tidak ada pemisahan antara aset dagang dengan aset peribadi, akibatnya tidak ada pengaruh yang kuat antara peningkatan keuntungan dengan permintaan modal kerja. Kemudian rasio bagi hasil tidak signifikan ini lebih disebabkan terutama oleh masih kurangnya pemahaman dari usaha kecil tentang sistem bagi hasil tersebut merupakan biaya dari penggunaan dana yang dipinjam, yang penting bagi pengusaha kecil pelayanan cepat dan tidak bertele-tele.
3.	Robiatul Adawiyah (2015)	Analisis Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa secara serempak Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital

		(UMKM) Pada PT Bank Riau Kepri Provinsi Riau	Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) dan Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM pada PT Bank Riau Kepri Provinsi Riau. Kemudian secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA) dan Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM di PT Bank Riau Kepri Provinsi Riau, sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM tetapi memiliki pengaruh negatif.
--	--	--	--

### 2.3. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teoritis yang telah dijelaskan diatas, maka dapatlah penulis mengemukakan hipotesis bahwa : “kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Cabang Pekanbaru dapat meningkatkan usaha kecil dilihat dari aspek pendapatan, jumlah tenaga kerja dan modal.”

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di kota Pekanbaru yaitu pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Cabang Pekanbaru yang beralamat di JL. Hasyim Azhari NO. 01. Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Pekanbaru karena merupakan salah satu Bank yang banyak memberikan kredit usaha kecil (UMKM) kepada masyarakat.

#### 3.2. Jenis dan sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini data data yang diperoleh dari debitur yang mendapat fasilitas kredit usaha kecil dan pemimpin PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Cabang Pekanbaru yang telah memberi fasilitas kredit kepada debitur.

Adapun data primer yang di butuhkan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Cabang Pekanbaru antara lain:

- Pendapatan usaha kecil
- Jumlah tenaga kerja usaha kecil
- Modal usaha kecil

Adapun data primer yang di perlukan dari responden antara lain:

- Jumlah dana pinjaman responden
  - Jenis Usaha responden
  - Pendapatan responden sebelum dan sesudah mendapatkan dana pinjaman dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Cabang Pekanbaru dan data-data lainnya yang dianggap penting.
- b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berkaitan erat dengan penelitian ini, misalnya data berupa laporan-laporan yang di susun oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Cabang Pekanbaru data ini berkenaan dengan sejarah atau gambaran umum perusahaan.

### 3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh debitur/nasabah yang mendapat fasilitas kredit usaha kecil Dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau yang berjumlah 47 Usaha kecil ditahun 2017. Sedikitnya jumlah populasi maka seluruh populasi dijadikan sampel menggunakan teknik sensus.

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kuesioner, yaitu data yang tertulis atau memberikan/penyebaran pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang sesuai dengan topik penelitian.

- b. Wawancara, yaitu pengumpulan informasi berhubungan dengan data primer dengan cara mengajukan pertanyaan sesuai dengan topik penelitian
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen perusahaan seperti laporan Pengkreditan, catatan atas laporan pengkreditan gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi serta dokumen-dokumen lainnya.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data digunakan metode deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis aspek (1) pendapatan, (2) jumlah tenaga kerja dan (3) modal responden sebelum dan sesudah mendapatkan kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau dan dianalisis dampak dari pemberian kredit terhadap 3 variabel tersebut.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan kota Pekanbaru ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (*pekan*) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>).

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (*Pakanbaru*) menjadi daerah otonom *kota kecil* dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau). (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Pekanbaru merupakan Ibu Kota Propinsi Riau. Pada waktu itu berupa dusun yang bernama : Dusun payung sekaki yang terletak ditepi sungai siak di seberang pelabuhan yang ada sekarang.

Pekanbaru merupakan sebuah kota yang terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Posisi sangat mendukung untuk menjadikan Pekanbaru sebagai sebuah kota transit baik dari maupun menuju kota-kota lain. Dengan Bujur Timur yang terletak pada titik 101- 36 dan 0-35 Lintang Utara, menjadikan pekanbaru sebagai daerah yang memiliki ketinggian 5-10 meter dari permukaan laut.

#### 4.2 Jumlah dan Luas Kecamatan di Kota Pekanbaru

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas Kota Pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan

9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Perda Nomor. 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan di Pekanbaru kembali dimekarkan. Kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung sekaki yang merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km<sup>2</sup>. Dan untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di Daerah kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.1 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (km)	Persentase
1	Tampan	59,81	9,46
2	Payung Sekaki	43,24	6,84
3	Bukit Raya	22,05	3,49
4	Marpoyan Damai	29,74	4,70
5	Tenayan Raya	171,27	27,09
6	Limapuluh	4,04	0,64
7	Sail	3,26	0,52
8	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
9	Sukajadi	3,76	0,59
10	Senapelan	6,65	1,05
11	Rumbai	128,85	20,38
12	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
	Total	632,26	100,00

Sumber : Kantor Statistik Kota Pekanbaru, 2018

Dari uraian diatas terlihat bahwa Kecamatan terluas didaerah kota Pekanbaru adalah Kecamatan Km<sup>2</sup> sedangkan Kecamatan terkecil dan Tersempit

adalah Kecamatan Pekanbaru Kota dengan Luas Wilayahnya 2,26 Km.

#### 4.3. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Pekanbaru

Dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan pembangunan yang sangat cepat maka di perlukan pendidikan untuk menggerakkan laju pembangunan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin keilmuan formal sekolah tetapi di dalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru merupakan salah satu hal yang patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan, Pekanbaru menjadi tujuan masyarakat luar daerah untuk mencari peruntungan. Hal ini terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan perumahan, yang kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas.

Dari tabel tersebut tampak bahwa penduduk terpadat diwilayah kecamatan Tampan dengan jumlah penduduk 201.182 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah kecamatan Sail yaitu 23.124 jiwa. Namun demikian karena wilayah kecamatan Pekanbaru relatif kecil maka kecamatan ini menjadi kecamatan terpadat penduduknya di kota Pekanbaru dibandingkan Kecamatan lainnya. Diperkirakan jumlah penduduk kota pekanbaru untuk saat ini berjumlah sekitar 847,378 jiwa yang tersebar pada 12 kecamatan, seperti diuraikan pada tabel halaman berikutnya :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tampan	104.059	97.123	201.182
2.	Payung Sekaki	53.045	48.083	101.128
3.	Bukit Raya	563	53.059	109.381
4.	Marpoyan Damai	7.587	70.954	146.221
5.	Tenayan Raya	76.979	71.034	148.013
6.	Limapuluh	22.063	22.418	44.481
7.	Sail	11.542	11.582	23.124
8.	Pekanbaru Kota	14.039	13.185	27.224
9.	Sukajadi	24.482	25.168	49.650
10.	Senapelan	18.915	19.425	38.340
11.	Rumbai	38.130	36.847	74.977
12.	Rumbai Pesisir	38.374	36.023	74.397
	Jumlah Total	533.217	504.901	1.038.118

Sumber : Kantor Statistik Kota Pekanbaru, 2018

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga, masyarakat Kota Pekanbaru telah berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang asasi bagi setiap individu dengan bekerja atau berusaha pada berbagai faktor, sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu. Peluang usahapun semakin bertambah pula seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tapi lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan semakin lajunya angka pertambahan penduduk, sehingga banyak yang tidak mendapat pekerjaan yang pada akhirnya banyak terjadi pengangguran, terlebih lagi peluang kerja yang ada hanya membutuhkan orang-orang yang terpilih.

Dengan adanya bidang usaha atau sektor usaha yang beraneka ragam telah menyebabkan komposisi mata pencaharian masyarakat Kota Pekanbaru yang heterogen, terpecah dalam berbagai sektor pekerjaan. Hal ini sesuai dengan

keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu atau bakat dan kemampuan yang ada pada diri seseorang.

Bagi anggota masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian atau pekerjaan besar, kemungkinan untuk melakukan perbuatan kejahatan tindak pidana jika di dibandingkan dengan orang yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian yang tetap. Dari data yang di peroleh, dapat dinyatakan bahwa dari berbagai macam bidang sektor mata pencaharian penduduk kota pekanbaru, sektor perdagangan mendominasi mata pencaharian masyarakat pekanbaru.

Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang hidup dari industri relative cukup besar. Semakin berkembangnya industri-industri di kota Pekanbaru merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi nasional, dimana industri memegang peranan penting dan menentukan, dan oleh karenanya perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia dan dana yang telah tersedia.

Makin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin bertambah atau meningkat pula jumlah pencari kerja. Salah satu upaya untuk menanggulangi pengangguran akibat semakin banyaknya jumlah pencari kerja, maka masyarakat Kota Pekanbaru berupaya menciptakan suatu lapangan kerja sendiri, sebagai upaya membuka usaha sendiri (berwiraswasta). Hal ini tidak saja berguna bagi mereka yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi juga berguna sebagai upaya untuk memberi peluang pekerjaan bagi masyarakat lainnya yang juga belum mendapat

pekerjaan.

Bagi masyarakat yang tidak dapat membuka peluang kerja atau bekerja ditempat lain telah mendorong bagi seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Tindak pidana ini semakin meningkat tatkala tidak ada satupun pihak yang melakukan bimbingan dan arahan kepada pelaku. Sebagaimana diketahui keberhasilan pembangunan pada berbagai sektor sangat dipengaruhi sektor pendidikan. Demi kelancaran program ini Pendidikan harus di tunjang dengan fasilitas dan saran-saran sesuai dengan kelayakannya.

#### 4.4. Sejarah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau

Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau adalah perusahaan dagang Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau, yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan pemerintah kota pekanbaru yang dipisahkan, yang selanjutnya disingkat dengan PT. BPR Mitra Rakyat Riau. PT. BPR Pekanbaru didirikan pada tanggal 23 juli 2005, dan diresmikan pada tanggal 15 agustus 2005 yang merupakan inovasi dari keuangan mikro sebelum milik pemerintah kota pekanbaru yang bernama lembaga perkreditan rakyat, tua negeri. Dengan modal minimal Rp. 5 milyar. Pendirian PT. BPR Mitra Rakyat Riau ini didorong oleh keinginan pemerintah kota pekanbaru dibawah kepemimpinan bapak walikota Drs. H Herman Abdullah, MM untuk memajukan sektor usaha mikro dan usaha kecil agar dapat berkembang menjadi usaha mandiri.

## 1. Dasar hukum pendirian

PT. BPR Mitra Rakyat Riau, didirikan berdasarkan peraturan daerah pekanbaru no. 11 tahun 2006, salinan keputusan gubernur Bank Indonesia no. 9/32// kep. Bi/ dpg/ 2005 tanggal 23 juli 2007 dan akta pendirian yang dibuat oleh notaris Eriyuf Brandel, SH. No. 45 tanggal 21 maret 2005.

## 2. Visi

Membangun usaha mikro dan usaha kecil menjadi usaha mandiri

## 3. Misi

- a. Memberikan pelayanan maksimal bagi usaha mikro bakulan yang belum dapat menikmati jasa pelayanan perBankan yang murah, mudah dan cepat.
- b. Membantu usaha mikro, kecil dan menengah dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- c. Membantu program pemerintah kota pekanbaru dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan.
- d. Membantu program pemerintah kota pekanbaru dalam pengembangan ekonomi kerakyatan dalam peneingkatan taraf hidup.

## 4.2 Produk – Produk PT. BPR Mitra Rakyat Riau

### 1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan nasabah yang diselenggarakan oleh PT. BPR Mitra Rakyat Riau dengan penarikan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Tabungan pada PT. BPR Mitra Rakyat Riau terbagi empat macam yaitu :

- a. Tamaru (tabungan masyarakat pekanbaru) adalah tabungan yang ditujukan khususnya masyarakat pekanbaru yang bersifat perorangan.
- b. Sikemas (simpanan kesejahteraan masyarakat) yang mana sikemas ditujukan kepada nasabah yang mempunyai tabungan kelompok yang bergerak dibidang lembaga keswadayaan masyarakat (LKM)
- c. Tabungku adalah tabungan atau simpanan untuk perorangan dengan persyaratan modal dari niaga yang diterbitkan oleh Bank- Bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- d. Tamaru Bank lain adalah tabungan atau simpanan yang dikhususkan untuk Bank – Bank yang ingin menabung di Bank BPR Mitra Rakyat Riau.

## 2. Deposito

Deposito adalah suatu bentuk simpanan dari pihak ketiga (deposan) kepada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan Bank ( 1, 2, 3 dan 12 bulan) dengan tingkat suku bunga umum 9,00 % Di BPR Mitra Rakyat Riau terdapat jenis produk deposito antara lain :

- a. Deposito Biasa, yaitu deposito yang ditawarkan pada masyarakat umum dalam jangka deposito 1, 3, 6, 12 bulan dengan tingkat suku bungan pada umumnya 9.00 %
- b. Deposito Pekanbaru, yaitu deposito yang hanya diperuntukkan pemerintah pekanbaru dalam jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan dengan tingkat suku

bunga deposito 1 bulan adalah 7,00 % dan 3, 6 dan 12 bulan tingkat suku bunganya 9,00 %

- c. Deposito Merdeka, yaitu deposito berjangka waktu 6 dan 12 bulan dengan tingkat suku bunga 9,00 %. Pada deposito ini pembayaran bunga dibayar dimuka
- d. Deposito Bank lain, yaitu deposito yang dilakukan Bank lain pada BPR Mitra Rakyat Riau berjangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan dengan tingkat suku bunga 9,00 %

### 3. Kredit

Kredit adalah pinjaman yang diberikan oleh PT. BPR Mitra Rakyat Riau kepada masyarakat yang mempunyai usaha UMKM. Baik dari sector perdagangan, pertanian, jasa dan industri. Dengan proses cepat dengan suku bunga bersaing, fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. BPR Mitra Rakyat Riau saat ini ada dua macam yaitu :

- a. Kredit usaha kecil yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, sebagai pemilik usaha kecil menengah mikro untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha. Plafon kredit usaha kecil yang diberikan mulai dari Rp 5 juta s/d 100 juta, dengan jangka waktu 12 bulan s/d 36 bulan. Sedangkan suku bunga yang diberikan berbeda – beda sesuai dengan jangka waktu. Jika jangka waktu 12 bulan maka suku bunga yang diberikan sebesar 18 %, untuk jangka waktu 24 bulan suku bunga yang diberikan sebesar 18,6 %, dan jangka waktu 36 bulan suku bunga yang diberikan sebesar 19,2 %.

- b. Kredit Konsumtif Alternatif yaitu kredit yang diberikan bagi golongan berpenghasilan tetap yang bekerja sama dengan PT. BPR Mitra Rakyat Riau, dengan plafon Rp 5 juta s/d 100 juta dengan jangka waktu s/d 36 bulan dan suku bunga tetap yaitu sebesar 18 %.
- c. Kredit investasi yaitu kredit atau pinjaman yang diberikan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, sebagai pemilik usaha kecil menengah mikro untuk memenuhi kebutuhan investasi.
- d. Kredit perkebunan yaitu kredit atau pinjaman yang diberikan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, yang mempunyai usaha kecil menengah mikro yang bergerak dibidang perkebunan untuk memenuhi kebutuhan pembelian kebun.
- e. Kredit konsumtif karyawan BPR, yaitu kredit atau pinjaman yang hanya diberikan kepada karyawan BPR Mitra Rakyat Riau yang telah bekerja selama 1 ( satu) tahun.
- f. Kredit konsumtif multi guna, yaitu kredit atau pinjaman yang diberikan kepada pegawai swasta yang telah mengadakan kerja sama dengan pihak BPR Mitra Rakyat Riau.

#### 4.5. Struktur Organisasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau

Dalam usahanya untuk mencapai tujuan, maka PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau memiliki dan menyusun organisasi agar dapat bekerja secara efisien. Adapun tugas dan garis besar pekerjaan pejabat PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau adalah sebagai berikut :

## 1. Direksi

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antara anggota Direksi dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap Bagian/ Cabang/ Seksi dan Kantor Kas berdasarkan azas perimbangan dan keserasian. Untuk menjalankan tugas tersebut Direksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a). Memimpin Bank berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- b). Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Bank berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- c). Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank kepada Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan keuangan dan pendanaan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapat pengesahan.
- d). Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala atas kegiatan Bank tiap-tiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- e). Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Bank kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas, untuk mendapat pengesahan.

## 2. Pimpinan Cabang

Pimpinan Cabang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a). Melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Cabang.
- b). Melakukan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dari masyarakat dan melayani jasa perbankan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c). Melakukan pengelolaan keuangan dan kekayaan Kantor Cabang.
- d). Menjabarkan dan menjalankan kebijaksanaan Kantor Pusat.
- e). Melakukan kegiatan Administrasi pembukuan, keuangan dan perlengkapan Kantor Cabang.
- f). Melakukan pelaporan tentang kegiatan dan performance Kantor Cabang secara berkala maupun bersifat khusus kepada Direksi.
- g). Memberikan bahan masukan kepada Direksi sebagai pertimbangan untuk proyeksi pengembangan bank pada masa yang akan datang.
- h). Melakukan pengawasan, pemantauan serta memberikan masukan terhadap seluruh kegiatan pada Kantor Cabang.
- i). Meminta persetujuan kepada Direksi/ Kantor Pusat untuk keperluan di luar wewenang Pimpinan Cabang.

### 3. Seksi Operasional

Seksi Operasional mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a). Melakukan pengadaan barang/ persediaan untuk kegiatan operasional bank dengan berkoordinasi dengan Bagian Umum dan Personalia Kantor Pusat.
- b). Melakukan pemeliharaan barang-barang Inventaris
- c). Memantau persediaan barang dan melakukan penyusutan
- d). Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang bertujuan untuk kemajuan bank.

- e). Memantau segala biaya-biaya yang dikeluarkan baik untuk keperluan Pimpinan Cabang maupun keperluan kantor.
- f). Membuat perintah bayar dan melaporkan rincian biayanya kepada Pimpinan Cabang.
- g). Melakukan urusan surat-menyurat dan pengarsipan.
- h). Melaksanakan pembukuan dan menerima laporan dari bagian-bagian lainnya
- i). Mengontrol setiap laporan pembukuan yang keluar
- j). Melakukan pengecekan yang berhubungan dengan laporan pembukuan
- k). Bertanggung jawab terhadap pemostingan transaksi-transaksi harian
- l). Membuat laporan perkembangan keuangan dan melaporkannya kepada Bagian Akuntansi.
- m). Membuat neraca evaluasi setiap periodik dan disampaikan pada Bagian Akuntansi.
- n). Bertanggung jawab terhadap laporan yang disampaikan untuk pihak-pihak yang membutuhkan.
- o). Melakukan perhitungan pajak yang akan dibayar dan mengkoordinasikannya dengan bagian Akuntansi/ Pelaksana Pelaporan.
- p). Melakukan pemindahbukuan.
- q). Pengelolaan rekening Rupa-Rupa Aktiva.

#### 4. Pelaksana Pembukuan

Pelaksana Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas antara lain :

- a). Menginput setiap transaksi non tunai dan melakukan pengecekan kepada bagian-bagian yang berkaitan dengannya.

- b). Melaksanakan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak pada instansi yang terkait.
- c). Membuat laporan rutin setiap bulan.
- d). Melaksanakan rekonsiliasi terhadap semua rekening antar kantor.
- e). Menyiapkan Laporan Keuangan lainnya sesuai dengan kebutuhan laporan yang diinginkan.

#### 5. Pelaksana Rumah Tangga

Pelaksana Rumah Tangga mempunyai tugas antara lain :

- a). Melakukan urusan surat-menyurat dan pengarsipan
- b). Membukukan daftar gaji serta tunjangan-tunjangan lainnya yang telah dibuat oleh Bagian Umum/ Personalia Kantor Pusat.
- c). Merekomendasikan mutasi pegawai tingkat pelaksana kepada Pimpinan Cabang.
- d). Merekomendasikan cuti, pendidikan, dan kesejahteraan pegawai kepada Pimpinan Cabang.
- e). Melakukan pemeliharaan barang-barang inventaris
- f). Memantau persediaan barang dan melakukan penyusutan
- g). Membuat perintah bayar dan melaporkan rincian biayanya kepada Pimpinan Cabang.
- h). Membuat laporan keuangan Kantor Cabang untuk keperluan laporan anggaran, laporan kepada Pemilik Bank, laporan kepada Badan Pengawas, serta laporan kepada Bank Indonesia setiap bulannya.

## 6. Seksi Dana

Seksi Dana mempunyai tugas antara lain :

a). Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan tugas, diantaranya :

- 1) Mengendalikan aktivitas pelayanan terhadap nasabah di front office dan mengupayakan pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
- 2) Memonitor dan memastikan bahwa pengelolaan dana berjalan secara efektif, efisien dan cukup aman.
- 3) Memonitor perkembangan dana serta Penempatan Dana yang lebih Produktif dan aman untuk likuiditas.
- 4) Meneliti kebenaran dan kelengkapan Administrasi Penerimaan dan Penarikan Tabungan dan Deposito baru.
- 5) Melakukan pemeriksaan fisik kas (*cash opname*) setiap hari dan memastikan tempat penyimpanan uang (khasanah / kluis) dalam kondisi aman.
- 6) Bertanggung jawab terhadap kode kerahasiaan kunci lemari besi tempat penyimpanan uang dan kunci pintu khasanah / kluis.

b). Memonitor perkembangan dana, diantaranya :

- 1) Memantau perkembangan dana tabungan dan deposito per periodik
- 2) Memonitor perkembangan dan pengelolaan dana bank
- 3) Mengelola likuiditas dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan dana yang ada di Kantor Cabang.
- 4) Mencetak daftar Simpanan Pihak Ketiga pada setiap akhir hari.

- 5) Melakukan Proses Pengalihan Data Harian sampai dengan Proses Akhir Hari dan Pencetakan laporan Harian / Bulanan
  - 6) Membuat Register Kas Harian.
- c). Melakukan administrasi keluar masuknya dana, diantaranya :
- 1) Melayani penerimaan setoran dan tarikan dana simpanan pihak ke III
  - 2) Melayani penerimaan dan pembayaran setoran kredit dan perintah bayar
  - 3) Menerima uang setoran dan membayarkan uang penarikan tabungan
  - 4) Mengadministrasikan dan mencatat voucher ke buku kas
  - 5) Mengadministrasikan (*posting*) mutasi tabungan dalam Aplikasi Tabungan
  - 6) Mencatat uang yang dikeluarkan dari Kabag Dana
  - 7) Melakukan closing Aplikasi Tabungan
  - 8) Memposting setiap pemindahan yang berhubungan dengan tabungan
  - 9) Bertanggung jawab terhadap keluar masuknya dana bank
  - 10) Menginventarisir uang tidak layak edar.
- d). Meneliti kebenaran data mutasi dana, di antaranya :
- 1) Membuat Laporan Dana Pihak Ketiga, Kantor Cabang, Kantor Kas dan Laporan Gabungan untuk kebutuhan Laporan kepada Bank Indonesia
  - 2) Meminta persetujuan untuk melakukan Pemindahan Dana Antar Bank dan Antar Kantor
  - 3) Membuat surat dan pemindahbukuan untuk keperluan Transfer Dana
  - 4) Menerima dan menyelesaikan pengaduan nasabah yang berhubungan dengan dana.
  - 5) Meneliti dan membuat laporan transaksi yang mencurigakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

#### 7. Pelaksana Kasir

Pelaksana kasir mempunyai tugas pokok antara lain:

- a). Menerima uang setoran dan membayarkan uang penarikan Tabungan atau Deposito.
- b). Memasukkan data (*entry*) mutasi tunai, tabungan dan deposito dalam Aplikasi Perbankan.
- c). Melayani penerimaan dan pembayaran setoran kredit dan perintah bayar
- d). Mengadministrasikan dan mencatat voucher ke buku kas.
- e). Melakukan posting dan penutupan kas pada akhir hari
- f). Bertanggung jawab atas jumlah nominal uang tunai sesuai dengan volume transaksi atau laporan harian
- g). Mengadministrasikan dan melaporkan transaksi tunai yang mencurigakan untuk ditindaklanjuti oleh yang berwenang.

#### 8. Pelaksana Pelayanan Nasabah

Pelaksana Pelayanan Nasabah (CS) mempunyai tugas antara lain :

- a). Memberikan informasi kepada calon nasabah/ nasabah atau kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang tabungan, deposito serta produk bank lainnya.
- b). Menyampaikan keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan produk-produk bank,
- c). Menyampaikan syarat-syarat dan prosedur pembukaan rekening tabungan dan deposito.

- d). Menampung, melayani dan menyelesaikan keluhan nasabah dan mengusahakan penyelesaiannya melalui Kepala Seksi Dana,
- e). Menyerahkan masalah pengaduan nasabah yang tidak bisa ditangani kepada Pimpinan Cabang melalui Kepala Seksi Dana.

Tugas harian antara lain :

- a). Mengelola file rekening tabungan / deposito
- b). Menyiapkan aplikasi pembukuan rekening tabungan / deposito, kartu contoh tanda tangan (*specimen*) dan formulir untuk data entry
- c). Mengelola aplikasi pembukuan rekening dan mengerjakan perubahan master file rekening tabungan / deposito.
- d). Memantau tanggal jatuh tempo deposito dan melayani administrasi perpanjangan serta pembayaran bunga deposito baik tunai maupun pemindahan.
- e). Memantau rekening tidak aktif dan melakukan penutupan rekening tabungan dengan persetujuan Kepala Seksi Dana,
- f). Memposting setfep pemindahan yang berhubungan dengan tabungan.
- g). Bertanggung jawab tentang keamanan arsip tabungan dan berkonsultasi dengan Kepala Seksi untuk langkah selanjutnya.

#### 9. Seksi Kredit

Seksi Kredit mempunyai tugas sebagai berikut:

- a). Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas.
- b). Memberikan penjelasan tentang syarat-syarat dan prosedur kredit kepada

calon nasabah

- c). Melakukan penelitian syarat-syarat serta mengadakan analisa kredit.
- d). Memberikan putusan kredit sebagaimana yang ditentukan oleh Pimpinan Cabang/Direksi.
- e). Mengusulkan kepada Direksi terhadap permohonan kredit di atas kewenangan Pimpinan Cabang.
- f). Melakukan penagihan dan pembinaan nasabah serta supervisi kredit sehingga pengembalian kredit dapat dilaksanakan tepat waktu
- g). Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tiadakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya
- h). Menyusun program-program penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- i). Meneliti mutasi rekening kredit yang menyimpang dan mengidentifikasi kredit bermasalah yang potensial akan mempengaruhi mutu portofolio kredit.
- j). Memonitor rekening-rekening pinjaman dan aktifitas usaha debitur
- k). Meneliti dan memastikan perhitungan dan pembayaran propisi, biaya administrasi, asuransi dan bunga kredit dilakukan secara benar.

Tugas Pokok Kepala Seksi Kredit antara lain:

- a). Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas pelaksana tugas dibawahnya.
- b). Memeriksa data/ dokumen dan melakukan analisa ulang terhadap permohonan kredit calon debitur yang diajukan oleh analis kredit.
- c). Mengajukan kepada Pimpinan Cabang dan atau kepada yang berwenang

memutuskan kredit tentang calon nasabah kredit.

- d). Memonitor rekening-rekening pinjaman dan aktivitas usaha debitur secara keseluruhan.
- e). Meneliti mutasi rekening kredit yang menyimpang dan mengidentifikasi kredit bermasalah yang potensial akan mempengaruhi mutu portofolio kredit.
- f). Membuat/ menyusun dan menganalisa rencana kerja dan anggaran perkreditan.
- g). Menempatkan kolektibilitas kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h). Melakukan pengavvasan terhadap Kualitas Aktiva Produktif dan NPL.
- i). Memberikan pembinaan, pengetahuan dan keterampilan pada bawahan serta melakukan penilaian terhadap kinerjanya dengan berpedoman pada kebijakan kepegawaian.
- j). Mengawasi proses pengikatan jaminan dan legalisasi perjanjian kredit.
- k). Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelayanan kredit mulai dari penerimaan permohonan kredit sampai seluruh kewajiban kredit tersebut lunas dibayar atau di kembalikan oleh debitur.

Tugas umum harian adalah :

- a). Mengawasi proses transaksi penyaluran dan penyetoran kredit.
- b). Mengajukan klaim asuransi kepada bagian yang menangani penyelesaian asuransi jiwa.
- c). Membuat laporan kredit secara keseluruhan kepada Bank Indonesia atau pihak lain.
- d). Melaporkan perkembangan kredit kepada Pimpinan Cabang.

## 10. Pelaksana Pelayanan Nasabah

Pelaksana Customer Service (CS) Kredit antara lain :

- a). Mengusahakan agar kegiatan pelayanan informasi kredit kepada nasabah berjalan baik dan lancar.
- b). Meningkatkan mutu pelayanan terhadap nasabah sehingga menarik minat nasabah untuk menikmati fasilitas kredit bank,
- c). Menampung, melayani dan menyelesaikan keluhan / pengaduan nasabah kredit dan mengusahakan penyelesaiannya melalui Kepala Seksi Kredit.
- d). Menyerahkan permasalahan pengaduan nasabah yang tidak dapat ditangani kepada Pimpinan Cabang melalui Kepala Seksi Kredit.

Tugas harian antara lain :

- a). Melengkapi dokumentasi permohonan kredit yang baru serta membantu nasabah dalam melengkapi persyaratan kredit.
- b). Menyampaikan kepada masyarakat/ nasabah tentang produk-produk Bank serta tata cara dan ketentuannya.
- c). Melayani dan memberikan pelayanan yang prima kepada setiap nasabah kredit.
- d). Memberikan dan menyampaikan informasi-informasi kredit yang diperlukan nasabah.
- e). Membimbing calon debitur untuk melengkapi persyaratan permohonan kredit.

## 11. Pelaksana Penagihan

Pelaksana Penagihan Kredit mempunyai tugas pokok :

- a). Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur yang sudah mendapatkan fasilitas Kredit.
- b). Mengoptimalkan agar NPL selalu rendah dengan melakukan penagihan dan penyelesaian terhadap kredit bermasalah.
- c). Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan yang perlu diambil.
- d). Membuat laporan perkembangan kredit.
- e). Membuat PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif)
- f). Membuat Laporan NPL (*Non Performance Loans*)
- g). Memantau dan mengawasi kredit yang mempunyai indikasi bermasalah.
- h). Melakukan pengawasan terhadap kredit non lancar.
- i). Menyusun program penyelesaian kredit bermasalah yang meliputi:
  - 1) Tata cara penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 2) Perkiraan jangka waktu penyelesaian.
  - 3) Perkiraan hasil penyelesaian.
  - 4) Memprioritaskan penyelesaian kredit bermasalah yang berskala besar.
- j). Menerima dan menyelesaikan kredit non lancar yang dilimpahkan dari Seksi Kredit.

Tugas Harian antara lain :

- a). Menginventarisir dan melaporkan serta berkonsultasi kepada Kepala Seksi Kredit dalam hal penanganan kredit bermasalah.
- b). Membina hubungan baik serta melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan oleh Kepala Seksi Kredit

- c). Melakukan penagihan terhadap setoran angsuran kredit yang belum disetor oleh debitur.
- d). Memberikan rekomendasi terhadap rencana tindakan yang dilakukan dalam pembinaan nasabah (terdiri dari Rescheduling, Restructuring dan Reconditioning)
- e). Memberikan rekomendasi untuk putusan Penghapusbukuan Kredit (*write off*).

## 12. Pelaksana Analisis Kredit

Pelaksana Analisis Kredit mempunyai tugas pokok :

- a). Menganalisa kelayakan usaha dan taksasi jaminan seluruh berkas permohonan kredit yang masuk.
- b). Menyampaikan analisa dan pertimbangan kelayakan kredit kepada Kepala Seksi Kredit.
- c). Bertanggung jawab penuh atas analisa kelayakan dan kebenaran usaha serta taksasi jaminan calon debitur yang akan dibiayai.
- d). Mencari calon nasabah yang potensial.
- e). Memberikan rekomendasi atas permohonan calon debitur kepada Kepala Seksi Kredit.
- f). Bertanggung jawab atas kelancaran kredit yang telah dianalisa.

Tugas harian antara lain:

- a). Melakukan kunjungan kepada calon debitur dalam rangka pemantauan terhadap kebenaran penggunaan kredit yang diberikan.
- b). Melakukan penilaian terhadap jaminan kredit, perubahan-perubahan dan pengawasan terhadap asset debitur secara berkesinambungan.

- c). Melakukan pengumpulan data dan informasi tentang calon debitur untuk pengambilan keputusan kredit.
- d). Melakukan analisa terhadap permohonan kredit serta kemampuan untuk membayar kembali fasilitas kredit yang diberikan.
- e). Meneliti dan menganalisa keadaan pasar dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari peluang bidang usaha yang potensial untuk dikembangkan.
- f). Memberikan Rekomendasi Keputusan Kredit kepada Kepala Seksi Kredit dan Pimpinan Cabang.

### 13. Pelaksana Administrasi Kredit

Pelaksana Administrasi Kredit mempunyai tugas pokok

- a). Memastikan kelengkapan persyaratan permohonan kredit.
- b). Memelihara dokumen perkreditan yang up to date
- c). Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan yang perlu diambil.
- d). Mempersiapkan dokumentasi perkreditan, antara lain perjanjian kredit, pengikatan barang jaminan dan pemindahbukuan kredit.
- e). Mempersiapkan laporan Rekapitulasi Penyaluran dan Pengembalian kredit.
- f). Mempersiapkan laporan kredit untuk kebutuhan laporan kepada Bank Indonesia atau pihak lain,
- g). Melakukan administrasi kredit, mempersiapkan dan meneliti perjanjian kredit
- h). Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan tugasnya

Tugas harian antara lain :

- a). Mengumpulkan dan menyelesaikan transaksi-transaksi kredit non tunai untuk diposting ke aplikasi pinjaman.
- b). Meneliti dan memastikan perhitungan dan pembayaran propisi, biaya administrasi, asuransi dan bunga kredit dilakukan secara benar.
- c). Membuat Pemindahan Amortisasi Propisi.
- d). Melakukan proses administrasi kredit dan mempersiapkan perjanjian kredit.
- e). Membuat Daftar Peserta Asuransi kepada pihak pengelola asuransi
- f). Mengajukan klaim asuransi kepada pihak pengelola asuransi serta mempersiapkan seluruh data yang dibutuhkan untuk proses tersebut
- g). Mempersiapkan dokumentasi perkreditan, antara lain perjanjian kredit, pengikatan barang jaminan dan pemindah bukuan kredit.
- h). Mengarsipkan seluruh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kredit.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Identitas Responden

Untuk mengetahui lebih mudah tentang kondisi responden maka perlu perlu diamati beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan responden sehari-hari, baik sebagai pengusaha golongan ekonomi lemah maupun sebagai masyarakat umum.

Adapun beberapa aspek yang perlu diamati dari pengusaha responden sebagai objek penelitian, yaitu usia responden, tingkat pendidikan responden, jumlah tanggungan, jenis usaha dan kepemilikan, umur usaha, jumlah tenaga kerja, keadaan permodalan responden dan aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan responden dalam melakukan usahanya.

Tingkat produktivitas seseorang untuk menghasilkan dan mengelola sesuatu tergantung pada usia. Faktor usia pada seseorang akan dapat menentukan hasil kerjanya. Secara umum pengusaha yang berusia muda atau produktif memiliki kemampuan produksi yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berusia lanjut. Pengusaha yang berusia muda dapat lebih cepat menerima inovasi baru dan bergerak secara dinamis dalam mengembangkan usahanya. Sementara pengusaha yang berusia tua sering menganggap dirinya sudah matang dalam pengalaman, sehingga sangat berhati-hati dalam bertindak dan cenderung tidak bisa menerima inovasi baru.

Pada usia 25-50 tahun tenaga kerja (pengusaha) dianggap masih produktif, sedangkan pada usia 41-50 tahun kondisi tenaga kerja sudah sampai pada batas maksimal, selanjutnya pada usia 50 tahun kondisi tenaga kerja sudah mulai menurun. Untuk mengetahui usia pengusaha sebagai responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 5.1 : Usia Responden Dirinci Menurut Kelompok Umur Tahun 2018

No.	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	< 30	8	17,1
2.	30-39	21	44,6
3.	40-49	15	31,9
4.	>50	3	6,4
Jumlah		47	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada umumnya pedagang berumur 30-39 tahun yang mencapai 21 orang atau 44,6%. Kemudian pedagang yang berumur 40-49 yang mencapai 15 orang atau 31,9%, sebanyak 8 orang atau 17,1% yang berumur <30 tahun dan pedagang yang lebih dari 50 tahun sebanyak 3 orang atau 6,4%.

Jadi pada umumnya umur pedagang yang dijadikan responden antara 30-39 tahun. Ini berarti bahwa pedagang biasanya adalah orang yang telah masuk dalam usia produktif, maksudnya adalah masa dimana seseorang masih aktif bekerja. Masa produktif membuat seseorang itu akan bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selanjutnya berkenaan dengan tingkat pendidikan, dimana pendidikan menunjukkan pengetahuan seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang cenderung akan memilih pekerjaan yang memiliki kesulitan yang lebih tinggi. Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden yang menerima kredit bakulan, kredit wirausahaan dan agribisnis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2 : Tingkat Pendidikan Responden di Pekanbaru Tahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	SD	5	10,6
2.	SMP	15	31,9
3.	SMA	27	57,5
	Jumlah	47	100

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada umumnya pedagang yang menerima kredit bakulan, kredit wirausaha dan agribisnis memiliki tingkat pendidikan SMA yang mencapai 27 orang atau 57,5%, kemudian sebanyak 15 orang atau 31,9% responden yang memiliki pendidikan SMP dan yang memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 5 orang atau 10,6%.

Suatu usaha akan berkembang dengan baik jika administrasi, kemampuan manajemen dan lain sebagainya dari pengusaha baik. Hal tersebut hanya didapat melalui pendidikan pelatihan keahlian yang selanjutnya akan berpengaruh pada pola pikir. Pola pikir pengusaha yang mendapat pendidikan tinggi tentu akan berbeda dengan pola berfikir mereka yang mendapat pendidikan rendah.

## 5.2. Dampak Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau terhadap pendapatan

### 5.2.1. Tingkat pendapatan dan keuntungan rata-rata sebelum memperoleh kredit

Sebelum mendapatkan tambahan modal dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau pengusaha kecil tidak mampu meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Hal ini disebabkan modal yang mereka miliki sangat terbatas. Dengan minimnya modal yang mereka miliki maka tingkat pendapatan dan keuntungan mereka rata-rata perbulan relatif kecil, sesuai dengan modal yang mereka miliki.

Tabel berikut ini akan ditampilkan klasifikasi rata-rata pendapatan dan rata-rata keuntungan per bulan pengusaha sebelum memperoleh kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau:

Tabel 5.3 : Klasifikasi Pendapatan pada usaha kecil Sebelum Memperoleh Kredit Dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Tahun 2018

No.	Pendapatan (Rp)	Jmlh (orang)	%
1.	1.000.000 – 2.000.000	10	21,3
2.	3.000.000 – 4.000.000	18	38,3
3.	5.000.000 – 6.000.000	6	12,8
4.	7.000.000 – 8.000.000	4	8,5
5.	9.000.000 – 10.000.000	9	19,1
	Jumlah	47	100

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 47 orang responden pengusaha kecil yang menjadi nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau terdapat 10 orang atau 21,3% responden yang memiliki modal di bawah Rp.

5.000.000 dengan pendapatan rata-rata Rp. 400.000 perbulan dengan tingkat keuntungan sebesar Rp. 250.000. Sementara pengusaha yang memiliki modal Rp. 6.000.000 – 10.000.000 sebanyak 18 orang atau 38,3% memiliki pendapatan sebesar Rp. 650.000 dengan tingkat keuntungan rata-rata sebesar Rp. 400.000 perbulannya. Selanjutnya pengusaha yang memiliki modal sebesar Rp 11.000.000 – 15.000.000 sebanyak 6 orang atau 12,8% memiliki pendapatan sebesar Rp. 2.500.000 dengan keuntungan rata-rata perbulan Rp 1.500.000. Terhadap responden yang memiliki modal sebesar Rp 16.000.000 – 20.000.000 sebanyak 4 orang atau 8,5% mampu memperoleh pendapatan sebesar Rp. 4.000.000 dengan tingkat keuntungan 2.500.000. Selanjutnya responden yang memiliki modal sebesar Rp. 20.100.000 ke atas sebanyak 9 orang atau 19,1% hanya mampu memperoleh pendapatan sebesar Rp 6.500.000 dengan tingkat keuntungan rata-rata sebesar Rp. 4.000.000 untuk perbulannya.

#### 5.2.2. Tingkat pendapatan dan keuntungan rata-rata setelah memperoleh kredit pada usaha kecil

Selanjutnya untuk memperoleh kemajuan pengusaha kecil di daerah ini, maka penulis juga memaparkan mengenai tingkat pendapatan dan keuntungan rata-rata perbulan yang diperoleh pengusaha kecil yang menjadi nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau setelah mereka menambah modal usahanya melalui fasilitas kredit yang disalurkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau.

Setelah memperoleh kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau pendapatan rata-rata dan keuntungan rata-rata responden menjadi meningkat.

Hal ini disebabkan karena modal untuk menjalankan usaha dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau telah membantu pengusaha kecil untuk mengolah atau mengembangkan usahanya. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan pada tabel klasifikasi pendapatan dan keuntungan rata-rata perbulan pengusaha setelah memperoleh kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau di bawah ini:

Tabel 5.4 : Klasifikasi Pendapatan pada usaha kecil Setelah Memperoleh Kredit Dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Tahun 2018

No.	Pendapatan Awal (Rp)	Jmlh (orang)	%
1.	10.000.000 – 20.000.000	6	12,8
2.	30.000.000 – 40.000.000	11	23,4
3.	50.000.000 – 60.000.000	5	10,6
4.	70.000.000 – 80.000.000	14	29,8
5.	90.000.000 – 100.000.000	11	23,4
Jumlah		47	100

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 47 orang responden pengusaha kecil yang menjadi nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau terdapat 6 orang responden (12,8%) yang memiliki modal di bawah Rp. 10.000.000 – 20.000.000,- dengan pendapatan rata-rata Rp. 5.000.000 perbulan dengan tingkat keuntungan sebesar Rp. 3.500.000. Sementara pengusaha yang memiliki modal Rp. 21.000.000 – 30.000.000,- sebanyak 11 orang (23,4%) memiliki pendapatan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan tingkat keuntungan rata-rata sebesar Rp. 8.000.000 perbulannya. Selanjutnya pengusaha yang memiliki modal sebesar Rp 31.000.000 – 40.000.000 sebanyak 5 orang (10,6%) memiliki

pendapatan sebesar Rp 15.500.000,- dengan keuntungan tara-rata perbulan Rp 12.000.000. Terhadap responden yang memiliki modal sebesar Rp 41.000.000 – 50.000.000 mampu memperoleh pendapatan sebesar Rp. 25.000.000 dengan tingkat keuntungan Rp. 20.000.000,- sebanyak 14 orang (29,8%). Selanjutnya responden yang memiliki modal sebesar Rp. 51.000.000 ke atas dengan jumlah responden sebanyak 11 orang atau 23,4% mampu memperoleh pendapatan sebesar Rp 35.000.000,- dengan tingkat keuntungan rata-rata sebesar Rp. 28.500.000,- untuk perbulannya.

Dari kondisi di atas secara keseluruhan memperlihatkan adanya peningkatan keuntungan dan pendapatan pengusaha kecil di daerah ini setelah memperoleh fasilitas kredit dari lembaga keuangan khususnya PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau, di mana berdasarkan lampiran 2 dapat dijelaskan rata-rata pendapatan sebelum memperoleh kredit adalah sebesar Rp. 16.380.000,- dan pendapatan rata-rata setelah memperoleh kredit adalah sebesar Rp. 27.086.000,-

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin besar modal yang dimiliki pengusaha kecil maka akan memperoleh tingkat pendapatan dan keuntungan yang besar. Sedangkan dengan modal yang kecil akan memperoleh pendapatan dan keuntungan yang kecil pula. Perbedaan dalam hal ini dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dimiliki oleh pengusaha kecil.

Peningkatan pendapatan dan keuntungan yang diperoleh pengusaha kecil tidak terlepas dari peranan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau sebagai lembaga jasa intermediasi yang menghubungkan pelaku ekonomi yang

berlebihan dana dengan pelaku ekonomi yang membutuhkan dana.

### 5.3. Dampak kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau terhadap

#### Jumlah Tenaga Kerja

Selain peningkatan pendapatan yang terjadi, dalam segi ketenagakerjaan juga mengalami peningkatan tenaga kerja sebelum dan sesudah memperoleh kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 5.6 : Peningkatan tenaga kerja sebelum dan sesudah memperoleh Kredit Dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Tahun 2018

No	Jumlah Tenaga Kerja	Sebelum (orang)	Sesudah (orang)	Peningkatan (%)
1.	1 – 2 orang	29	10	34
2.	3 – 4 orang	17	32	188
3.	> 5 orang	7	5	71
Jumlah		47	47	

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah mendapatkan kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau mengalami peningkatan. Pada usaha bakulan yang sebelum mendapat kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau tidak menggunakan tenaga kerja tetapi setelah mendapatkan kredit dari 29 usaha bakulan sebanyak 25 usaha bakulan yang menggunakan tenaga kerja dengan jumlah peningkatan sebesar 82.7%, kemudian pada usaha wirausaha juga tidak menggunakan tenaga kerja sebanyak 15 usaha wirausaha sebelum mendapatkan kredit tetapi setelah memperoleh kredit sebanyak 13 usaha wirausaha yang menggunakan tenaga kerja dengan peningkatan sebesar 86.7% dan usaha

agribisnis sebanyak 3 usaha yang tidak menggunakan tenaga kerja sebelum memperoleh kredit tetapi setelah memperoleh kredit menjadi 2 usaha agribisnis yang menggunakan tenaga kerja dengan peningkatan sebesar 66.7%.

#### 5.4. Dampak Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau terhadap modal usaha kecil di Kota Pekanbaru

Masalah perkreditan di Kota Pekanbaru melibatkan 2 (dua) kelompok yang kepentingan, yaitu pedagang atau masyarakat yang membutuhkan modal usaha di satu pihak disebut debitur dan lembaga perkreditan dalam hal ini dilain pihak sebagai kreditur.

##### 5.4.1. Kondisi modal responden sebelum kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau

PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau dalam hal pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil di Kota Pekanbaru menyalurkan jenis kredit bakulan, kredit wirausaha dan agribisnis. Dengan adanya penyaluran kredit bagi pengusaha kecil, maka permasalahan modal yang dihadapi usaha kecil baik pada saat memulai usaha atau pada saat menegmbangkan usaha dapat diatasi tanpa memanfaatkan jasa keuangan informal seperti tengkulak. Karena tengkulak dapat memberikan kerugian bagi pihak pengusaha kecil. Karena diketahui secara pasti bunga kredit yang diberikan para tengkulak sangat besar bahkan melebihi dari jumlah kredit pengusaha kecil. Sehingga jumlah hutang pengusaha kecil tidak terlunaskan.

Untuk melihat kondisi permodalan pengusaha kecil di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.8 : Keadaan Modal Usaha responden Sebelum Mandapat Fasilitas Kredit Dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Tahun 2018

No	Jumlah Modal (Rp)	Jumlah (orang)	%
1.	Di bawah 8.000.000	-	-
2.	8.000.000 – 12.000.000	29	61,7
3.	13.000.000 – 16.000.000	15	31,9
4.	17.000.000 – 20.000.000	3	3,4
	Jumlah	47	100

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa modal awal para pengusaha kecil daerah ini relatif kecil dan bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari ketiga jenis kredit tersebut yaitu kredit bakulan yang paling sedikit memiliki modal 8 juta – 12 juta sebanyak 6 usaha atau sebesar 20.7% dan yang terbanyak yaitu modal 17 juta – 20 juta sebanyak 9 orang atau sebesar 31.1%. Sedangkan kredit wirausaha modal yang paling kecil 21 juta sebanyak 2 usaha atau sebesar 13.4% dan yang terbanyak yaitu memiliki modal 8 juta – 12 juta sebanyak 5 usaha atau sebesar 33.4 %. Dan kredit agribisnis paling kecil memiliki modal 8 juta – 12 juta yaitu hanya 1 usaha atau sebesar 33.4% dan yang paling banyak memiliki modal 13 juta – 16 juta yaitu sebanyak 2 usaha atau sebesar 66.6%.

#### 5.4.2. Kondisi modal responden setelah kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau

Untuk melihat kondisi permodalan setelah memperoleh kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.9 : Keadaan Modal Usaha responden Sesudah Mandapat Fasilitas Kredit Dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau Tahun 2018

No	Jumlah Kredit (Rp)	Responden Kredit Bakulan	%
1.	10.000.000 – 20.000.000	2	24.1
2.	21.000.000 – 30.000.000	6	10.3
3.	31.000.000 – 40.000.000	12	13.8
4.	41.000.000 – 50.000.000	16	31.1
5.	> 50.000.000	11	20.7
	Jumlah	47	100

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa modal awal para pengusaha kecil daerah ini relatif kecil dan bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari ketiga jenis kredit tersebut yaitu kredit bakulan yang paling sedikit memiliki modal 21 juta – 30 juta sebanyak 3 usaha atau sebesar 10.3% dan yang terbanyak yaitu modal 41 juta – 50 juta sebanyak 9 orang atau sebesar 31.1%. Sedangkan kredit wirausaha modal yang paling kecil 50 juta keatas sebanyak 2 usaha atau sebesar 13.4% dan yang terbanyak yaitu memiliki modal 10 juta – 20 juta sebanyak 4 usaha atau sebesar 26.6 %. Dan kredit agribisnis paling kecil memiliki modal 21 juta – 30 juta yaitu hanya 1 usaha atau sebesar 33.4% dan yang paling banyak memiliki modal 31 juta – 40 juta yaitu sebanyak 2 usaha atau sebesar 66.6%.

Dari kondisi di atas secara keseluruhan memperlihatkan adanya peningkatan modal usaha dari pengusaha kecil di daerah ini setelah memperoleh fasilitas kredit dari Lembaga Keuangan khususnya PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau, di mana dapat dijelaskan rata-rata modal awal pengusaha kecil sebelum memperoleh kredit adalah sebesar Rp. 8.756.522,- dan modal setelah

memperoleh kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau rata-rata modal sebesar Rp. 20.191.304,-.

#### 5.5. Pembahasan

a. Dampak kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau terhadap pendapatan

Dari kondisi di atas secara keseluruhan memperlihatkan adanya peningkatan keuntungan dan pendapatan pengusaha kecil di daerah ini setelah memperoleh fasilitas kredit dari lembaga keuangan khususnya PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau, di mana berdasarkan lampiran 2 dapat dijelaskan rata-rata pendapatan sebelum memperoleh kredit adalah sebesar Rp. 16.380.000,- dan pendapatan rata-rata setelah memperoleh kredit adalah sebesar Rp. 27.086.000,-

Demikian dapat dilihat keuntungan rata-rata yang diperoleh sebelum mendapatkan kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau adalah sebesar Rp. 1.453.624,- dan keuntungan yang diperoleh setelah mendapatkan kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau adalah rata-rata sebesar Rp. 5.700.000,-.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin besar modal yang dimiliki pengusaha kecil maka akan memperoleh tingkat pendapatan dan keuntungan yang besar. Sedangkan dengan modal yang kecil akan memperoleh pendapatan dan keuntungan yang kecil pula. Perbedaan dalam hal ini dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dimiliki oleh pengusaha kecil.

Peningkatan pendapatan dan keuntungan yang diperoleh pengusaha kecil tidak terlepas dari peranan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau sebagai lembaga jasa intermediasi yang menghubungkan pelaku ekonomi yang berlebihan dana dengan pelaku ekonomi yang membutuhkan dana.

b. Dampak kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau terhadap tenaga kerja

Dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah mendapatkan kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau mengalami peningkatan. Pada usaha bakulan yang sebelum mendapat kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau tidak menggunakan tenaga kerja tetapi setelah mendapatkan kredit dari 29 usaha bakulan sebanyak 25 usaha bakulan yang menggunakan tenaga kerja dengan jumlah peningkatan sebesar 82.7%, kemudian pada usaha wirausaha juga tidak menggunakan tenaga kerja sebanyak 15 usaha wirausaha sebelum mendapatkan kredit tetapi setelah memperoleh kredit sebanyak 13 usaha wirausaha yang menggunakan tenaga kerja dengan peningkatan sebesar 86.7% dan usaha agribisnis sebanyak 3 usaha yang tidak menggunakan tenaga kerja sebelum memperoleh kredit tetapi setelah memperoleh kredit menjadi 2 usaha agribisnis yang menggunakan tenaga kerja dengan peningkatan sebesar 66.7%.

c. Dampak Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau terhadap modal

Secara keseluruhan memperlihatkan adanya peningkatan modal usaha dari pengusaha kecil di daerah ini setelah memperoleh fasilitas kredit dari Lembaga

Keuangan khususnya PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau, di mana dapat dijelaskan rata-rata modal awal pengusaha kecil sebelum memperoleh kredit adalah sebesar Rp. 8.756.522,- dan modal setelah memperoleh kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau rata-rata modal sebesar Rp.20.191.304,-.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan keuntungan dan pendapatan pengusaha kecil di daerah ini setelah memperoleh fasilitas kredit dari lembaga keuangan khususnya PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau.
2. Adanya peningkatan jumlah tenaga kerja setelah memperoleh fasilitas kredit dari lembaga keuangan khususnya PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau.
3. Adanya peningkatan modal usaha dari pengusaha kecil di daerah ini setelah memperoleh fasilitas kredit dari Lembaga Keuangan khususnya PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau.

#### 6.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Hendaknya PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Rakyat Riau lebih dapat meningkatkan pelayanan untuk memberikan tambahan modal yang lebih banyak lagi dengan persyaratan yang lebih ringn, sehingga pengusaha kecil lebih dapat meningkatkan produktifitasnya dalam mengembangkan usahanya.
2. Hendaknya kepada pengusaha kecil lebih giat lagi dalam melakukan

pengembangan usaha agar usaha yang dijalani saat ini terus mengalami perkembangan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Basri, H Faisal, 2002, *Kontribusi Industri Kecil dan Menengah dalam Ekspor Non Migas*, Usahawan, Jakarta.
- Dermawan, Indra, 2005, *Pengantar Keuangan dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2009, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ginting, Kuta, 2002, *Profil Usaha Kecil di Indonesia*, (Kumpulan Essei), LPM-FUI, Jakarta.
- Joyosumarto, Subarjo, 2008, *Kebijakan Penyaluran dan Pengawasan Kredit Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Judisseno, Rimsky K, 2002, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Munawir, 2003, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta
- Munir, S, 2001, *Analisa Laporan Keuangan*, Liberty, Yogyakarta.
- Murdiah, 2001, *Pedoman Mengelola Perusahaan Kecil*, Firma Mitra Handayani, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ ; 2007, *Uang dan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nopirin. 2000. *Ekonomi Internasional, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE
- Reed, Edward. W, 2005, *Bank Umum, Edisi 4*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rijanto, Bambang, 2000, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N Idroes; 2007, *Bank and Financial Institution Management*, Rajawali Pers, Jakarta : Rajawali Pers

Sinungan Muchdarsyah, 2001, *Dasar-dasar Tehnik Manajemen Perkreditan*, Bina Aksara, Jakarta.

Suyatno, Thomas, 2003, *Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri*, Intermedia, Jakarta

\_\_\_\_\_; 2003, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta

Sadono Sukirno, 2005, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Jakarta : Erlangga

Teguh Pudjo Mulyono. 2006, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, Yogyakarta: BPFE.

Tjiptoadinugroho, R, 2006, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Wirasasmita, Rivai, Sulaeman, Maman Kusman, Sitorus, Ronald H, Manurung, Brenggan, 2002, *Kamus Lengkap Ekonomi*, CV. Pionir Jaya, Bandung.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 *Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, Fokusmedia, Jakarta.